



**PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
DIDALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN
USAHA KOPERASI**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Ika Widyaningrum
B4B 008 127

PEMBIMBING :

Mochammad Dja'is ,S.H., C.N., M.Hum.

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

**PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
DIDALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN
USAHA KOPERASI**

Disusun Oleh :

Ika Widyaningrum

B4B 008 127

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Studi Magister Kenotariatan

PEMBIMBING :

Mochammad Dja'is ,S.H., C.N., M.Hum.

NIP : 19532810 197802 1 001

**PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM
DIDALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN
USAHA KOPERASI**

Disusun Oleh :

**Ika Widyaningrum
B4B 008 127**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Mochammad Dja'is ,S.H., C.N., M.Hum.

NIP : 19532810 197802 1 001

H. Kashadi, S.H., M.H.

NIP : 19540624 198203 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : **IKA WIDYANINGRUM** dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/ lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingann akademik / ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Juni 2010

Ika Widyaningrum

ABSTRAK

PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DIDALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI.

Dalam pendirian koperasi, para pendiri koperasi harus berhubungan dengan notaris karena selain akta notaris berfungsi sebagai *formalitis causa*, juga agar kedudukan koperasi menjadi kuat. Tujuan penelitian mengetahui peranan notaris, fungsi akta pendirian koperasi, hambatan-hambatan dan cara mengatasi didalam pembuatan akta pendirian koperasi. Sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Bahan hukum dan data diperoleh melalui studi pustaka dan survey lapangan dengan alat pengumpul kajian dokumen dan wawancara pada Dinas Koperasi dan notaris di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes.

Berdasarkan analisis kualitatif diketahui peranan notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi selain membuat dan mengurus pendaftaran akta pendirian koperasi, juga berkewajiban menjelaskan seluk beluk koperasi kepada para pendiri koperasi untuk perkembangan koperasi; akta pendirian koperasi berfungsi sebagai: untuk syarat adanya koperasi (*formalitis causa*); hambatan dalam pembuatan akta pendirian koperasi: banyak para pendiri koperasi yang tidak memahami tentang koperasi dan takut berhubungan dengan notaris karena dianggap notaris itu mahal; hambatan tersebut diatasi dengan: memberi penjelasan seluk beluk koperasi serta peran notaris didalam memperkuat koperasi.

Kata Kunci : Notaris, Akta Pendirian Koperasi.

ABSTRACT

NOTARY PUBLIC OFFICERS AS A ROLE IN THE MAKING OF BUSINESS COOPERATION AGENCY ESTABLISHMENT DEED.

In the establishment of a cooperation, the founders of the cooperation should be associated with notarial deed because in addition to functioning as *formalitatis causa*, and also to the position of cooperations to be strong. The aim of research to know the role of the notary, the function of the establishment of cooperations, the barriers and how to overcome in making the deed of establishment of cooperations. The nature of analytical descriptive study with a juridical approach empirically. Legal materials and data obtained through library and field surveys with the means to collect documents and interview studies on Cooperation and notary in the town of Tegal and Brebes.

Based on qualitative analysis of the role of notaries in making known to the establishment of cooperations in addition to create and manage registration certificate of establishment of cooperations, is also obligated to explain the ins and outs of the founders of the cooperation to the cooperation for the development of cooperations, the establishment of cooperations to function as: to the terms of cooperation (*formalitatis causa*); barriers in making the deed of establishment of cooperations: a lot of the founders of the cooperation who does not understand about the cooperation and the fear associated with the notary public notary public because it is considered expensive; barriers are overcome by: explaining the ins and outs of cooperations and the role of notaries in the strengthening of the cooperation.

Keywords: Deed, Deed of Establishment of the Cooperation.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Robbil'amin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia, rahmat dan berkat-Nya sehingga Penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini, dengan judul : **PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DIDALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI.**

Penulisan tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan wawasan dan pengetahuan dari penulis, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak. Harapan penulis, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulisan tesis ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu didalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama pelaksanaan penyusunan tesis ini, antara lain ;

1. Bapak **Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS.Med, Sp.And.**, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak **H. Kashadi S.H, M.H**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak **Prof. Dr. Budi Santoso, S.H, M.S**, selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak **Mochammad Djais, S.H, C.N, M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan saran-saran dalam penulisan tesis ini hingga selesai.
5. Bapak **Triyono S.H, M.Kn.** dan Ibu **Siti Mahmudah S.H, M.H.** Selaku Dosen Penguji.
6. Para Dosen dan seluruh Staff Pengajaran Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang telah mendidik penulis selama perkuliahan.
7. Bapak **M. Salman.**, selaku pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Brebes, yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.
8. Bapak **Kartono, S.H.**, selaku kepala seksi Pemberdayaan Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perindustrian dan Perdagangan Kota Tegal, yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada penulis.

9. Ibu Notaris **Deviyanti Rosita, S.H.**, Ibu Notaris **Nur Halimah, S.H.**, Ibu Notaris **Yuni Andaryanti, S.H.**, Ibu Notaris **Suprihatin, S.H.**, Ibu Notaris **Farah Fauziah, S.H.**, dan Ibu Notaris **Hertanti Pindayani, S.H.** selaku responden dalam penulisan tesis ini yang telah berkenan meluangkan waktu dan kesempatannya membantu dan memberikan keterangan serta data-data yang berguna dalam penulisan tesis ini.
10. Teman-teman angkatan 2008 kelas A1 Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Teristimewa penulis haturkan rasa hormat dan rasa terima kasih kepada Bapak **H. Drs. Mulhadi** dan Ibu **Hj. Wartimah, Spd** selaku orang tua dari penulis, dan **Dwika Widyaningtyas, S.KM.**, selaku adinda penulis, yang telah banyak memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang yang tulus ikhlas kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

Begitu juga penulis ucapkan rasa terima kasih kepada **Indra Widiarto**, yang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di bidang Kenotariatan dan dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Semarang, Juni 2010

Penulis

Ika Widyaningrum

DAFTAR ISI TESIS

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
PERNYATAAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris.....	19
1. Dasar Hukum.....	19
2. Sejarah Tentang Notaris.....	20
3. Pengertian Notaris.....	36
4. Syarat Untuk Dapat Diangkat Sebagai Notaris.....	38

5. Kewenangan dan Kewajiban Bagi Notaris.....	39
6. Larangan Bagi Notaris.....	41
B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	42
1. Dasar Hukum.....	42
2. Sejarah Koperasi Indonesia.....	43
3. Pengertian Koperasi.....	50
4. Landasan Dasar Koperasi.....	57
5. Asas Koperasi Indonesia.....	62
6. Tujuan Koperasi.....	63
7. Fungsi dan Peran Koperasi di Indonesia.....	65
8. Prinsip-prinsip Koperasi Indonesia.....	69
9. Bentuk dan Jenis Koperasi Indonesia.....	75
10. Perangkat Organisasi Koperasi.....	80
11. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi.....	84
12. Proses Pendirian Koperasi Indonesia.....	87

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Notaris Didalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.....	92
1. Pembuatan Akta Koperasi Menurut Undang-Undang NO. 25 Tahun 1992.....	92
2. Tata Cara Pengangkatan Notaris Pembuat Akta Koperasi Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004.....	95

3. Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.....	101
4. Perolehan Status Badan Hukum Koperasi.....	104
5. Peranan Notaris Didalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.....	110
B. Fungsi Dari Akta Pendirian Koperasi yang Dibuat Oleh Notaris.....	113
C. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Notaris Didalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi dan Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Tersebut.....	122
1. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Notaris Didalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.....	122
2. Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Dihadapi Oleh Notaris Didalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi.....	123

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	130

DAFTAR PUSTAKA.....	131
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga negaranya. Sistem perekonomian di Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menentukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), adalah pedoman utama bagi orientasi dan penjabaran penyusunan perencanaan membangun perekonomian Indonesia.

Di dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), dijelaskan bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih diutamakan daripada kemakmuran dan kesejahteraan pribadi. Hal ini semakin mempertegas bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasarkan demokrasi ekonomi, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) ini menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional dan bagian integral tata perekonomian nasional.¹

Apabila pemerintah berhasil meningkatkan perekonomian negara, maka semakin dapat diharapkan juga bahwa bagi anggota masyarakat akan semakin

terbuka kemungkinan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup dan memajukan kesejahteraan masyarakat adalah melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi. Agar hal ini dapat terwujud, sangat dibutuhkan pula peran aktif dari masyarakat dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Pemerintah tidak mungkin dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan peran aktif dari masyarakat.

Bentuk peran aktif dan dukungan dari masyarakat bagi pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, yang dapat dilakukan melalui koperasi. Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasannya yaitu Pancasila. Kekhususan koperasi di

¹ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Hal. 269.

Indonesia sangat di pengaruhi oleh ideologi bangsa dan sistem politik ekonomi negara yang tercermin dari isi peraturan perundang-undangan yang mengatur perkoperasiaan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan bahwa : Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-seorang atau badan-badan hukum, yang memberikan kebebasan bagi anggotanya

untuk masuk atau keluar dari koperasi dan bekerja sama secara kekeluargaan dalam menjalankan usahanya untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan oleh orang-orang karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan yang bertalian dengan perusahaan ataupun rumah tangga mereka. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung secara terus menerus, oleh sebab itu dibentuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerja sama tersebut.

Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secara gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Semangat kebersamaan ini, tidak saja dalam bentuk gotong royong bertanggung jawab atas kegiatan usaha koperasi tetapi juga dalam bentuk memiliki modal bersama.² Oleh karena itu, jelas bahwa peran koperasi sangat penting dalam menumbuh dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta dapat mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan serta keterbukaan.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks, maka koperasi harus memiliki kepastian hukum. Cara untuk memperoleh kepastian hukum yaitu dokumen-dokumen/ surat-surat yang dibuatnya tersebut, harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Setiap masyarakat membutuhkan seorang *figuur* yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangan serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang

tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut dan membuat surat perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang.³

² R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 39

³ Tan Thong Kie, *Stud Notariati: Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), Hal. 162.

Pendirian suatu koperasi diperlukan atau menggunakan suatu akta notaris yang berkekuatan hukum yang kuat. Dengan adanya kekuatan hukum ini lah yang menjadi dasar kegiatan perkoperasian, supaya mempunyai perlindungan bagi lembaga dan pengurusnya.

Dalam perkembangannya, perjanjian yang semula dibuat secara lisan, kemudian dengan berkembangnya zaman perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, hal ini timbul karena dirasakan penting oleh semua pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, serta dapat dijadikan suatu bukti bahwa telah terjadi perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dan menjadi bukti jika terjadi sengketa dalam hal yang diperjanjikan oleh para pihak yang membuatnya.

Perjanjian yang dibuat secara tertulis ini adalah merupakan suatu alat bukti tertulis. Alat bukti tertulis ini adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi suatu alat untuk pembuktian. Jadi akta tersebut harus ditandatangani untuk dapat dimasukkan dalam pengertian akta.

Oleh sebab itu perjanjian-perjanjian itu harus dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dalam Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian-perjanjian tersebut harus dibuat oleh notaris. Untuk dapat melakukan suatu perjanjian yang sah, maka diperlukan syarat-syarat dalam suatu perjanjian tersebut.

Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 (empat) syarat yang harus di penuhi, untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal. ⁴

Dengan dipenuhinya syarat-syarat tersebut di atas maka perjanjian tesebut telah mengikat & berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Notaris di dalam menjalankan tugasnya, wajib melaksanakan jabatannya dengan penuh tanggung jawab serta menghayati seluruh martabat jabatannya dan dengan keterampilan yang ada pada diri seorang notaris, maka notaris melayani kepentingan masyarakat yang meminta jasanya, dan selalu notaris wajib mentaati ketentuan Undang-Undang, etika, ketertiban seorang notaris wajib diikuti dengan kesadaran bekerja secara mandiri, jujur, tidak berpihak dan dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di dalam menjalankan tugas sebagai seorang profesionalis yang memiliki integritas dan moral yang baik, notaris menjalankan tugas jabatannya hanya pada satu kantor tanpa pula diperkenankan mempergunakan perantara serta melakukan

⁴ ~~Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Pasal 1320.~~

promosi berbentuk apapun, juga dituntut disamping memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang mampu juga berkewajiban pula memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.

Sebagai seorang warga negara Indonesia yang baik yang memiliki profesi dan profesional, wajiblah notaris juga bertanggung jawab dalam pembangunan

mencerdaskan bangsa. Karena itu dituntut juga bagi seorang notaris dalam tugas jabatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa memberikan penyuluhan hukum agar tercapai suatu kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara dan anggota masyarakat.⁵

Kebijakan melibatkan notaris di dalam pendirian koperasi, bukan dimaksudkan untuk menjadikan beban bagi koperasi, tetapi melainkan agar kedudukan koperasi semakin kuat dengan adanya akta pendirian koperasi yang dibuat secara otentik.

⁴ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Profesi Tentang Profesi Hukum*, (Jakarta: CV. Ananta, 1994), Hal. 133 - 134

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu tema yang akan penulis bahas dengan judul :
PERANAN NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM DIDALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN BADAN USAHA KOPERASI.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini, agar dapat terarah pada sasaran serta menjaga agar pembahasan tidak terlalu luas ruang lingkupnya dan karena keterbatasan waktu serta kemampuan penulis, maka ruang lingkup pembahasan masalah dibatasi pada :

1. Bagaimana peranan notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi?

2. Apa fungsi dari akta pendirian koperasi yang di buat oleh notaris?
3. Apa hambatan-hambatan yang di hadapi oleh notaris di dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu yang disesuaikan dengan judul penelitian. Sesuai dengan judul yang penulis tulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi.
2. Untuk mengetahui fungsi dari akta pendirian koperasi yang di buat oleh notaris.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi oleh notaris di dalam pembuatan akta pendirian koperasi dan untuk mengetahui bagaimana cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Nilai yang terkandung dari suatu penelitian tidak terlepas dari besarnya manfaat yang akan diperolehnya. Dengan adanya penelitian ini, manfaat yang akan diterima oleh penulis adalah :

1. Manfaat Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi terutama mahasiswa Magister Kenotariatan dan untuk menambah kajian mengenai peranan notaris sebagai pejabat umum didalam pembuatan akta pendirian badan usaha koperasi guna pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum sebagai suatu disiplin ilmu terhadap masalah yang ada di dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan masukan kepada masyarakat pada umumnya dan bagi notaris untuk dapat diterapkan dalam menjalankan wewenangnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK), dan penelitian ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

E. Kerangka Pemikiran

Pembentukan koperasi sebagai badan usaha harus melalui prosedur hukum yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Sebelum diberlakukannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, akta pendirian koperasi dibuat secara di bawah tangan dan atau dibuat oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk membuat akta otentik (dibuat sendiri oleh para pendiri koperasi). Para pendiri koperasi dapat meminta

sendiri pengajuan pengesahan koperasi kepada dinas koperasi. Apabila disetujui oleh Dinas Koperasi maka koperasi tersebut sudah dapat menjalankan usahanya.

Akta pendirian koperasi yang tidak otentik tersebut mudah hilang dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum, dan apabila terjadi perkara, maka akta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sempurna.

Untuk itu diberlakukanlah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Akta pendirian koperasi setelah diberlakukannya Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 98 Tahun 2004 harus dibuat oleh notaris, dimana notaris tersebut telah diangkat sebagai pejabat umum dan akta-akta yang dibuat oleh notaris tersebut akan mempunyai keotentikan dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendirikan sebuah koperasi, adalah:

1. Mengadakan pertemuan pendahuluan diantara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi;
2. Mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi;
3. Mengadakan hubungan dengan kantor Dinas Koperasi setempat;
4. Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;

5. Mengadakan rapat pembentukan koperasi. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rapat pembentukan koperasi ini adalah :
 - a. Memilih pengurus;
 - b. Memilih pengawas dan
 - c. Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
6. Mengajukan permohonan status badan hukum koperasi dengan melampirkan petikan berita acara pembentukan koperasi serta daftar nama anggota pengurus dan pengawas.⁶

Setelah ditetapkannya Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi, ini mempertegas bahwa hanya notaris yang berhak membuat akta koperasi, dan tidak semua notaris dapat membuat akta koperasi. Didalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

⁵ Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Hal. 114-115.
Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Pasal 4 menyatakan syarat untuk menjadi Notaris pembuat akta koperasi yaitu:

1. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris;
2. Memiliki sertifikat tanda bukti mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditanda tangani oleh menteri.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data atau bahan yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian hukum dengan metode yang lazim digunakan dalam metode penelitian hukum dengan maksud untuk mendekati kebenaran yang berlaku umum dengan suatu teknik penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penggunaan pendekatan yuridis empiris yang dimaksud adalah melakukan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sistematika sebuah undang-undang, kasus, dokumen-dokumen, dan teori-teori yang berkaitan dengan peranan notaris sebagai pejabat umum didalam pembuatan akta pendirian koperasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai peranan notaris sebagai pejabat umum didalam pembuatan akta pendirian koperasi.

Bersifat analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan peranan Notaris sebagai pejabat umum didalam pembuatan akta pendirian koperasi.

3. Populasi dan Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin meneliti seluruh populasi itu, tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.

Dalam penelitian ini, metode penentuan sampel yang di gunakan adalah purposive sampling, yaitu suatu teknik penarikan sampel secara acak, dimana setiap obyek atau individu mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel.

Penelitian ini dilakukan oleh penulis di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, dengan obyek penelitiannya adalah Notaris yang pernah membuat akta koperasi di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tegal dan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Brebes. .

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti melalui wawancara, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan sejumlah responden mengenai sekitar masalah yang diteliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, akan tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah suatu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Seperti penggunaan buku-buku literatur, media cetak, hasil penelitian, serta tulisan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan diteliti oleh penulis adalah di kantor notaris dan di Dinas Koperasi dan UKM di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes yang memahami permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, tahap berikutnya adalah menganalisa data. Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap suatu masalah yang diteliti. Sebelum menganalisa data, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang ada untuk mengetahui keakuratannya.

G. Sistematika penulisan

Dalam penulisan tesis ini, agar terstruktur dan mudah dipahami maka penulis membuat sistematika penulisan tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup.

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan disini merupakan uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, yang berisi tentang masalah- masalah yang menjadi

obyek penelitian yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini terdiri dari tinjauan pustaka yang merupakan uraian tentang bahan pustaka yang berkaitan dengan judul dan perumusan masalah untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Bab ini terdiri dari gambaran umum tentang peranan notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi, fungsi dari akta pendirian koperasi yang di buat oleh notaris, dan hambatan-hambatan yang di hadapi oleh notaris didalam pembuatan akta pendirian koperasi serta cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut .

BAB IV Penutup

Penulis mengakhiri tesis ini dengan bab penutup yang terdiri dari : kesimpulan dari seluruh materi yang dirumuskan dalam bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban terhadap pokok masalah dan saran sebagai masukan baru khususnya mengenai peranan notaris sebagai pejabat umum didalam pembuatan akta pendirian badan usaha koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Dasar Hukum

Tentang notaris di Indonesia, semula diatur di dalam *Reglement op het notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No.3).⁷ Kemudian Jabatan Notaris diatur dalam :

- a. Ordonantie tanggal 16 September 1931, Tentang Honorarium Notaris,

b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, Tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Dalam perkembangannya, banyak ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Jabatan Notaris yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan masyarakat di Indonesia. Sehingga pada tanggal 6 Oktober 2004, di undangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam

⁷ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 29.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 117 yang terdiri dari XIII bab dan 92 pasal.

2. Sejarah Tentang Notaris

Perkataan *notaris* berasal dari perkataaan *notarius*, yaitu nama yang pada zaman Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Fungsi *notarius (notarii)* ini masih sangat berbeda dengan fungsi notaris pada saat sekarang. Nama *notarius* ini lambat laun mempunyai arti berbeda dengan semula, sehingga kira-kira pada abad ke-dua sesudah Kristus yang disebut dengan nama itu ialah mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Kemudian dalam abad ke-lima dan ke-enam sebutan *notarius* itu diberikan kepada penulis (sekretaris) pribadi raja (*Kaizer*), sedangkan pada akhir abad ke-lima sebutan tersebut diberikan kepada pegawai-pegawai istana yang melaksanakan pekerjaan administratif.

Pejabat-pejabat yang dinamakan *notarii* ini merupakan pejabat-pejabat yang menjalankan tugas untuk pemerintahan dan tidak melayani publik (umum), sedangkan yang melayani publik dinamakan *tabelliones*. Mereka ini menjalankan pekerjaan sebagai penulis untuk publik yang membutuhkan keahliannya. Sesungguhnya fungsi mereka sudah agak mirip dengan notaris pada zaman sekarang, tetapi tidak mempunyai sifat "*ambtelijk*", sifat jabatan negeri, sehingga surat-surat yang dibuatnya tidak mempunyai sifat otentik. Mereka membuat akta-akta, rekes-rekes dan lain sebagainya, tetapi semuanya ini merupakan surat-surat biasa yang sifat otentiknya tidak ada. Dalam tahun 537 Kaisar Justianus telah mengatur pekerjaan dan kedudukan *tabelliones* ini dalam suatu *constitutie*, tetapi pekerjaan dan kedudukan mereka tetap tidak mempunyai sifat "*ambtelijk*". Karena eratnya hubungan pekerjaan dengan hukum, maka mereka itu ditaruh dibawah pengawasan kehakiman.

Disamping *tabelliones* terdapat juga apa yang dinamakan *tabularii*. Mereka ini sesungguhnya adalah pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk memegang dan mengerjakan buku-buku dari keuangan kota-kota serta melakukan pengawasan terhadap administrasi dari masyarakat kota. Kemudian mereka ditugaskan juga untuk menyimpan surat-surat atau dokumen-dokumen bahkan diberi wewenang juga untuk membuat akta-akta. Dengan demikian maka publik lebih banyak mengalihkan perhatiannya kepada *tabularii* dan lebih suka mempergunakan jasa-jasa mereka itu daripada *tabelliones*, karena *tabularii* ini mempunyai sifat "*ambtelijk*" dan berhak menyatakan secara tertulis terjadinya tindakan-tindakan hukum.

Dalam pemerintahan gereja, *notarii* itupun mempunyai kedudukan dan peranan yang penting, baik di dalam lingkungan Paus maupun di dalam instansi-instansi gereja yang lebih rendah. Dalam pemerintahan Paus, para *notarii* merupakan suatu *college* yang tertutup dengan dikepalai oleh *primicerius notariorum*. Mula-mula *notarii* dari pemerintahan Paus ini merupakan pejabat-pejabat administratif, tetapi lambat laun menjadi kebiasaan bahwa sengketa hukum oleh Paus diserahkan kepada Dewan Kanselarijnya yang memutuskan tentang hal itu, dalam hal mana para *notarii* dari pemerintahan Paus ini ikut memberikan pertimbangannya. Konstelasi dalam pemerintahan Paus mengenai *notarii* ini, diikuti pula oleh instansi gereja yang lebih rendah, demikianlah di gereja-gereja diadakan pula *notarii* yang mula-mula hanya mempunyai tugas menjalankan pekerjaan administrasi belaka. Karena bertambahnya pengaruh dari gereja dalam kehidupan masyarakat dan adanya kemunduran dalam kalangan *tabelliones*, maka publik dengan sendirinya lebih banyak minta jasa-jasa dari kaum rohaniawan gereja, dan demikian para *notarii* gereja ini terutama ditugaskan untuk membuat akta-akta dan surat-surat dibidang hukum perdata.

Notarii gereja ini dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu :

- a. Mereka yang bekerja dibawah gereja atau dibawah pejabat gereja yang lebih rendah dari Paus.
- b. Mereka yang diangkat oleh gereja atau oleh pejabat gereja, dan ditugaskan untuk memberi bantuan kepada publik untuk urusan-urusan yang tidak

semata-mata mengenai gereja. Mereka ini dinamakan "*clericus notarius publicus*".

Selama kerajaan Romawi Barat diduduki oleh bangsa Lombardia (568-774) pada umumnya keadaan ketatanegaraan tidak berubah. Para *tabelliones* tetap memberikan jasa-jasanya kepada publik, tidak hanya kepada orang-orang Romawi, melainkan juga kepada orang-orang Lombardia. Bahkan Raja-Raja Lombardia menyusun pemerintahannya seperti bangsa Romawi Barat dan mempergunakan juga dewan *notarii* dalam kabinetnya, seperti juga raja-raja dari negara Romawi Timur dan kerajaan gereja (Paus).

Pada zaman kekuasaan Lombardia itu, *notarii* kerajaan dipilih dari *tabelliones* yang cakap dan karena itu lambat laun *notarii* kerajaan ini yang juga memberikan jasanya kepada publik, lebih disukai dan dihargai daripada *tabelliones* biasa, karena itu didaerah-daerah yang dikuasai oleh raja-raja Lombardia nama "*tabellio*" lambat laun diganti dengan "*notarius*". Karel Agung, Raja dari bangsa Frank telah mengadakan perubahan dalam peradilan yang merupakan perubahan yang besar dalam notariat. Ia menetapkan bahwa di tiap-tiap pengadilan daerah (yaitu daerah seorang *graaf* kira-kira sama dengan bupati) diperbantukan "*notarius*" atau "*cancellarius*" atau disebut juga "*scabini*" dengan tugas mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang pengadilan. Setelah Lombardia (Italia) ditundukkan oleh Karel Agung maka ia pada tahun 800 dinobatkan sebagai Kaisar Romawi. Perubahan dalam peradilan yang diadakan seperti

tersebut di atas di seluruh daerah kekuasaannya yang luas, kemudian diterapkan juga di daerah Lombardia yang telah ditaklukkan.

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Lombardia pun diadakan *notarii* yang diperbantukan pada pengadilan di daerah (*graaf*). Pejabat-pejabat ini menamakan dirinya “*notarius comitatus*” atau “*notarius civitatis*”.

Syarat-syarat yang ditentukan untuk dapat diangkat sebagai *notarius* yang diperbantukan kepada *graaf* (bupati) antara lain adalah : terkenal dengan nama yang baik dan mempunyai kecakapan tentang hukum. Selanjutnya ditetapkan juga, bahwa ia tidak akan membuat surat-surat yang tersembunyi (dirahasiakan) maupun surat-surat palsu.

Para *notarii* yang diperbantukan pada *graaf* (bupati) yang disebut *cancellarius* ini tugasnya ialah mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang Pengadilan dalam daerah *graaf*, termasuk juga keputusan (vonis) dari pengadilan yang bersangkutan. Hanya dalam hal seseorang tidak dapat hadir pada sidang pengadilan karena sebab-sebab yang syah, umpamanya karena sakit, maka *notarius* didampingi oleh saksi-saksi datang dirumah orang yang bersangkutan, membuat akta dari keterangan orang yang bersangkutan dan membawanya ke pengadilan.

Scabini adalah pejabat yang diperbantukan kepada pengadilan untuk mendampingi dalam proses pengadilan. *scabini* yang diperbantukan pada pengadilan yang dipimpin oleh raja dinamakan : “*scabini sacri palatii*” atau “*scabini domini regis*”, sedangkan *notarii* yang

diperbantukan kepada pengadilan dinamakan “*notarii domini*” atau “*notarii sacri palatii*”. Jabatan ini sangat terhormat dan merupakan jabatan pilihan, karena itu para *tabelliones* dan *notarii* berusaha untuk dapat diangkat sebagai “*notarius commitatus*” bahkan bila mungkin sampai “*notarius sacri palatii*”. Karena jabatan-jabatan ini berwenang pula untuk menjalankan *tabelliones*, artinya dapat melayani publik, maka publik tentunya akan memilih *notarii* yang sudah mendapat kedudukan tinggi itu, karena mereka ini secara formal telah dinyatakan berkualitas baik.

Para *notarii commitatus* dan *Notarii sacri palatii* membentuk badan (*corporatie*) yang tertutup yang menolak campur tangan pihak lain dalam pekerjaan mereka. Untuk diterima sebagai anggota badan tersebut ditetapkan bahwa *notarii* itu mendapat pengangkatan dari pemerintah. Lambat laun *tabelliones* dan notariat pengadilan tergabung dalam satu badan (*corporatie*) ialah *corporatie* daripada *notarii* yang diangkat oleh pemerintah. *Notarii* dari *corporatie* ini memang betul-betul dianggap sebagai pejabat-pejabat yang mempunyai wewenang khusus untuk membuat akta-akta, baik akta pengadilan maupun akta di luar pengadilan. Demikianlah di Itali terbentuk notariat yang sudah banyak persamaannya dengan notariat sekarang, sekalipun sudah banyak perbedaannya. Bagaimanapun juga ini dapat dikatakan sebagai permulaan dari notariat seperti yang di kenal sekarang ini. Perbedaan yang besar ialah bahwa akta

notaris pada waktu itu masih belum mempunyai kekuatan otentik dan belum mempunyai kekuatan eksekusi.

Notariat tidak hanya berkembang di Italia, melainkan berkembang juga di Perancis. Pada tahun 1270 Raja Perancis Lodewijk yang suci telah mengangkat notaris sebagai pejabat (*ambtenaar*), tetapi hal ini hanya berlaku untuk kota Paris saja. Raja Philips pada tahun 1304 mengangkat para notaris di seluruh negara sebagai pejabat dan menetapkan suatu perundang-undangan tentang notariat.

Kepercayaan yang diberikan kepada akta notaris itu dapat dipersamakan dengan surat-surat (akta-akta) dari *tabelliones* dari zaman Romawi kuno, sedangkan pembuktiannya hanya didasarkan atas kesaksian di bawah sumpah, sehingga tidak mempunyai sifat surat (akta) umum dan karena itu tidak mempunyai sifat otentik.

Baru pada abad ke-13 Masehi sifat otentik, artinya sifatnya sebagai akta umum diakui, apabila akta itu berasal dari seorang notaris yang diangkat oleh pejabat pemerintah. Tetapi baru dalam abad ke-15, dengan meniru apa yang ditentukan dalam satuan dari kota-kota merdeka dari negara Lombardia, orang lalu memberikan kekuatan pembuktian kepada akta-akta notaris. Akan tetapi hal ini tidak pernah diakui secara umum. Meskipun demikian, dimana akta-akta notaris itu diakui kekuatan pembuktiannya, para ahli hukum berpendapat, bahwa akta notaris dapat diterima dalam pengadilan sebagai bukti yang mutlak mengenai isinya, tetapi meskipun demikian dapat diadakan penyangkalan dengan bukti

sebaliknya oleh saksi-saksi, yang dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh notaris dalam aktanya adalah tidak benar.

Semenjak itu akta-akta notaris tidak lagi dibuat hanya sebagai alat untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, melainkan dibuat untuk kepentingan kekuatan pembuktiannya.

Adapun kekuatan eksekusi tidak pernah ada berdasarkan perundang-undangan dari hukum Belanda Kuno sampai pada berlakunya undang-undang Perancis yang dinamakan *Ventosewet* (sekitar tahun 1803) yang berlaku juga di negara Belanda yang menjadi tanah jajahan dari Perancis.

Dengan amanat (*decreet*) Raja tanggal 8 Nopember 1810, maka Undang-Undang 25 *Ventose an XI* yang memuat peraturan tentang notariat diperlakukan untuk negara Belanda. Dengan demikian maka notariat Perancis telah dipindahkan di negara Belanda, dan terjadilah peraturan umum yang pertama tentang notariat di negara Belanda, yang merupakan landasan dari Hukum notariat di negara itu dan kemudian menjadi dasar dari perundang-undangan notariat di Indonesia.

Meskipun pada tahun 1791 apa yang dinamakan "*jurisdictie voluntaria*" atau "*voluntaire juridictie*" (kewenangan hukum yang bebas) yang dasarnya tidak diberikan lagi kepada notaris, karena terpisahnya jabatan ini dari kekuasaan kehakiman, namun hal yang pokok dari *voluntaire jurisdictie* ini dalam Undang-Undang *Ventose* tidak dihilangkan.

Dalam abad ke-14 *statuten* dari berbagai kota yang merdeka mengandung ketentuan bahwa akta-akta notaris dari anggota “*collegium notarium*” dalam kota mempunyai kekuatan eksekusi. Demikianlah maka kekuatan eksekusi dari akta notaris sesungguhnya timbul dan terjadi di Italia Utara, yang kemudian berlaku juga di negara Perancis dan kemudian baru diakui di negara Belanda dengan diperlakukannya *Ventose-vet*. Sesungguhnya peraturan umum tentang notariat di negara Belanda, yang pada waktu itu disebut *Vereenigde Nederlande*, sudah terjadi pada waktu pemerintahan Kaisar Karel V ialah dengan plakat 21 Maret 1524 untuk mengatasi tidak teraturnya notariat pada waktu itu. Dalam *dictum* dari plakat raja itu antara lain disebutkan bahwa jumlah notaris ditetapkan untuk tiap-tiap kota dan bahwa mereka itu harus diuji dan disumpah dan didaftarkan pada suatu Dewan Tinggi.

Meskipun di Nederland pada tahun 1813 telah mendapatkan kemerdekaannya kembali, tetapi peraturan notaris dari *Veatosewet* yang berasal dari Perancis masih tetap berlaku. Lambat laun rakyat menghendaki supaya dalam bidang notaris juga diadakan perundang-undangan nasional dan usaha ini berhasil dengan diperlakukannya “*De Wet op het Notarisambt* dari 9 Juli 1842”.

Dalam penjelasan dari pemerintah pada waktu membuatnya undang-undang notariat pada tahun 1842 tersebut, Undang-Undang *Ventose* tidak dikesampingkan, melainkan sebaliknya, apa yang dianggap berguna dan bermanfaat, dioper oleh undang-undang nasional itu.

Undang-Undang *Ventose 25 an XI* dari Perancis yang memuat peraturan tentang notariat secara definitive dengan nama "*Loi organique du notariat*" sesungguhnya merupakan sumber dari "*De wet op het notarisambt*" dari tahun 1842, yang selanjutnya atas dasar asas *concordantie* melahirkan "*Reglement op het Notarisambt in Ned. Indie*" (Peraturan Jabatan Notaris di Hindia Belanda) dari tahun 1860.

Di Nederland pada tahun 1842 dibentuk undang-undang dengan nama "*De wet op het notarisambt*" yang pada Pasal 1 menentukan kedudukan dan fungsi notaris.

Di Indonesia peraturan mengenai notaris dicantumkan dalam "*Reglement op het Notarismbt*" dari tahun 1860. Di dalam *Reglement op het Notarisambt* di Indonesia, di dalam Pasal 1 diadakan juga ketentuan yang sama mengenai kedudukan dan fungsi notaris. Sejarah notaris di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah notariat di Nederland dan Perancis.

Di Indonesia, yang pertama kali diangkat sebagai notaris adalah Melchior Kerchem, Sekretaris dari *College van schepeenen* pada tanggal 27 Agustus 1620 sesudah didirikannya kota Jakarta pada tanggal 4 Maret 1621 sebagai ibukota dari *Oost Indische Compagnie*. Instruksi mengenai tugas dan wewenang dicantumkan dalam surat pengangkatannya. Dengan singkat disebutkan bahwa ia ditugaskan menjabat jabatan *notarius publicus* dalam wilayah kota Jakarta, dan untuk kepentingan publik di wilayah itu membuat akta-akta, surat-surat dan lain-lainnya serta mengeluarkan salinan-salinannya. Selanjutnya ditugaskan kepadanya

untuk menjalankan jabatannya sesuai dengan sumpah kesetiaannya, dengan kewajiban secara jujur dan tidak ada penyelewengan membuat semua alat-alat (bukti) dan akta-akta notaris, serta mencatatnya dalam buku tertentu, selanjutnya berbuat segala sesuatu yang baik, yang patut diharapkan dari seorang notaris.

Lima (5) tahun kemudian sesudah jabatan *notarius publicus* dipisahkan dari sekretaris pengadilan, maka pada tanggal 16 Juni 1625 ditetapkanlah “Instruksi untuk para notaris” yang pertama di Indonesia (Hindia Belanda). Instruksi ini hanya terdiri dari 10 Pasal, antara lain menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan.

Sesudah pengangkatan notaris pertama oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, maka kemudian jumlah notaris dalam kota Jakarta ditambah, berhubung dengan dirasakannya kebutuhan akan Pejabat ini. Sementara itu di luar kota Jakarta timbul juga kebutuhan akan notaris, maka diangkatlah notaris-notaris di pos-pos luar oleh penguasa-penguasa setempat. Dengan demikian maka mulailah notariat berkembang di wilayah Hindia Belanda.

Pada tahun 1795 pengurus dari *Vereenigde Oost Indische Compagnie (V.O.C)* dihapuskan dan diganti dengan *Committee* untuk urusan dagang dan harta benda di Hindia Timur V.O.C. dihapuskan dan pengurusan serta pimpinan dari urusan colonial beralih ke tangan negara

ialah *Bataafsche Republiek* (1795-1806), tetapi baru pada tahun 1800, V.O.C. telah betul-betul bubar, baik secara nyata maupun secara hukum. Segala keuntungan dan utang-utangnya dioper oleh *Bataafsche Republiek*. Dengan demikian maka yang berkuasa tidak lagi suatu perusahaan dagang dengan nama *Vereenigde Oost Compagnie (V.O.C)*, melainkan negara dengan nama *Bataafsche Republiek*.

Sementara itu *Bataafsche Republiek* di Nederland berubah menjadi *Koningrijk Holland* (Kerajaan Belanda) di bawah Raja Lodewijk Napoleon, saudara dari Napoleon Bonaparte.

Peperangan yang terjadi antara Nederland dan Perancis di satu pihak dan Negara Inggris di pihak lain (1795-1811) berakibat bahwa kekuasaan di Indonesia, termasuk Jawa beralih kepada Inggris. Kekuasaan ini di pulau Jawa berlaku mulai tahun 1811-1816. Tetapi selama itu notariat yang terbanyak dijalankan di pulau Jawa tidak mengalami perubahan.

Sesudah kekuasaan Inggris berakhir, maka kekuasaan di Indonesia kembali lagi kepada pemerintahan Belanda. Gubernur Jenderal pertama yang diangkat oleh *Koningrijk Holland* adalah Mr. Herman Willem Daendels, yang dikalangan bangsa Indonesia dikenal sebagai penguasa yang keras dan kejam, antara lain terkenal sebagai yang memuat jalan dari ujung barat sampai ujung timur pulau Jawa untuk kepentingan pertahanan, dan dikenal sebagai Jalan Daendels. Ia diberi kekuasaan penuh untuk membuat undang-undang, peraturan-peraturan dan ordonansi-ordonansi yang dianggap perlu untuk kepentingan Kerajaan dan tanah-tanah jajahan

di Asia. Meskipun terjadi perubahan-perubahan dalam pemerintahan, mulai dari zaman V.O.C., *Bataafsche Republiek*, Kerajaan Belanda, Penguasa Inggris, lalu kembali lagi kekuasaan Nederland, notariat di Jawa tidak mengalami perubahan dan berjalan terus atas dasar peraturan-peraturan yang telah berlaku pada waktu itu.

Pada tahun 1822 dengan Resolusi Gubernur Jenderal 7 Maret 1822 Nomor 8, diadakan Instruksi untuk notaris, yang mengadakan pengaturan yang lebih luas dan terperinci mengenai jabatan notaris. Di dalam Instruksi itu ditentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang bertugas untuk membuat akta-akta dan kontrak-kontrak supaya diberikan kekuatan dan kebenaran kepadanya. Selanjutnya diadakan peraturan-peraturan yang sudah lebih terperinci antara lain tentang bentuk dari akta, harus adanya dua orang saksi, tentang larangan untuk membuat akta dimana notaris sendiri dan sanak keluarganya berkepentingan dan lain sebagainya.

Instruksi tahun 1822 ini sudah lebih mengarah pada Peraturan Jabatan Notaris yang lebih lengkap. Meskipun Instruksi Tahun 1822 ini dalam masa berlakunya sampai 38 tahun lamanya, beberapa kali mengalami perubahan, namun berdasarkan atas Instruksi itu, akta notaris hanya mempunyai kekuatan otentik, tidak mempunyai kekuatan eksekusi.

Dengan berlakunya undang-undang baru di Nederland mengenai notariat adalah "*De wet op het Notarisambt*" dari Tahun 1842, maka pemerintahan Hindia Belanda menganggap perlu mengadakan perundang-undangan baru mengenai notariat di Indonesia yang sesuai dengan

perundang-undangan notariat di Nederland. Maka pada tahun 1860 ditetapkanlah “*Reglement op het Notarisambt in Nederland Indie*” (Stbl 1860 Nomor 3) untuk menggantikan “*De instructie voor de Notarissen, residerende in Nederland Indie*” dari tahun 1822.

Perubahan terakhir terjadi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954, hanya beberapa tahun setelah terjadi penyerahan kedaulatan dari Nederland kepada Republik Indonesia atas wilayah apa yang dahulu dinamakan Nederlands Indie, kecuali Irian Barat. Perubahan status kenegaraan ini berakibat bahwa para notaris yang berkewarganegaraan Belanda harus meninggalkan jabatannya, sehingga terjadi *vacuum* yang harus di isi. Undang-undang ini untuk pertama kalinya diciptakan jabatan Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara.

Di Indonesia, sebagian besar masyarakatnya masih tunduk pada hukum adat, ialah hukum yang tidak tertulis. Berlakunya hukum tidak tertulis bagi sebagian masyarakat Indonesia sebagai hukum positif dan hukum materiil, di samping lembaga notariat yang tugasnya terutama menciptakan alat pembuktian yang kuat bagi berbagai peristiwa hukum, maka merupakan tantangan bagi para notaris untuk menjadikan lembaga notariat sebagai suatu alat untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada golongan ini, sehingga lembaga ini lambat laun dirasakan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dalam bidang hukum untuk golongan yang tunduk kepada hukum adat. Apabila hal ini tercapai, maka notaris di Indonesia akan merupakan suatu profesi yang tidak

terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, seperti di Eropa dan negara-negara lainnya, dan dengan sendirinya akan mengalami kemajuan yang cepat.⁸

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hal. 13-27.

3. Pengertian Notaris

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004, di jelaskan bahwa notaris adalah : " pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini ". Apabila kita lihat dari ketentuan tersebut diatas, dikatakan bahwa notaris adalah pejabat umum, artinya orang yang diangkat untuk bertugas menjalankan jabatan-jabatannya untuk melayani kepentingan umum (publik) dan tidak di bayar oleh negara.

Akan tetapi hal ini tidak berarti, bahwa notaris adalah pegawai negeri, yakni pegawai yang merupakan bagian dari suatu korps pegawai yang tersusun, dengan hubungan kerja yang hierarkis, yang digaji oleh pemerintah. Jabatan notaris bukan suatu jabatan yang digaji, notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah, sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.⁹

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 36.

Notaris merupakan pejabat yang mempunyai spesialisasi tersendiri, karena ia merupakan pejabat negara yang melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.

Adalah suatu keharusan untuk menjadikan notaris sebagai pejabat umum, berhubung dengan definisi dari akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang berbunyi :

Suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.¹⁰

Dari Pasal tersebut jelas menggambarkan bahwa tugas pokok dari notaris adalah membuat akta-akta otentik yang menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berfungsi sebagai alat pembuktian yang mutlak. Dalam arti bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi siapa saja yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk pribadi maupun untuk kepentingan usaha.

¹⁰ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan Oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Pasal 1868.

Tidak semua notaris dapat membuat akta koperasi. Didalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pembuat akta koperasi Pasal

4 dijelaskan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai notaris pembuat akta koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Peraturan Jabatan Notaris;
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditanda tangani oleh menteri.

4. Syarat Untuk Dapat Diangkat Sebagai Notaris

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (duapuluh tujuh) tahun ;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulus jenjang strata du kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (duabelas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata duakenotariatan; dan
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.¹¹

5. Kewenangan dan Kewajiban Bagi Notaris

Di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa kewenangan notaris adalah :

- (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengeluarkan semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Notaris berwenang pula :
- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya;

¹¹ Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, Pasal 3

- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Sedangkan di dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, di jelaskan mengenai kewajiban dari notaris, yaitu :

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :
- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

¹² Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, Pasal 15

- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
- m. Menerima magang calon notaris.¹³

6. Larangan Bagi Notaris

Di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, dinyatakan bahwa notaris dilarang untuk :

a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;

¹³ Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, Pasal 16

- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

1. Dasar Hukum

Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), menentukan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), dikemukakan bahwa dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah penilikan anggota-anggota masyarakat. kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan

¹⁴ Undang-Undang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, Pasal 17 kemakmuran orang-seorang. Oleh sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan usaha kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Untuk merealisasikan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), pembentuk undang-undang telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Kemudian undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Berdasarkan undang-undang ini, apabila akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi disahkan oleh Pemerintah, maka koperasi ini telah memperoleh status badan hukum.¹⁵

2. Sejarah Koperasi di Indonesia

Keberadaan koperasi di Indonesia dapat dipahami melalui sejarah regulasi yang mengatur tentang koperasi di Indonesia. Melalui kronologi dan sejarah peraturan perundang-undangan tersebut, maka akan diketahui pokok-pokok pikiran dan pokok-pokok perubahan dalam pengaturan, sehingga dapat diketahui arah perkembangan koperasi yang ada di Indonesia. Kekhususan koperasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ideologi bangsa dan sistem politik ekonomi negara yang tercermin dari isi peraturan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 97

perundang-undangan yang mengatur perkoperasian di Indonesia.¹⁶

Mula-mula Koperasi tumbuh pada awal abad ke-19, sebagai hasil usaha spontan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas serta akibat penderitaan sosial ekonomi yang timbul dari sistem kapitalisme. Kemudian mereka mempersatukan diri untuk menolong diri mereka sendiri, serta ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Koperasi tumbuh dan berkembang terutama di negara-negara yang menganut paham demokratis, karena disini rakyatnya memiliki kesempatan untuk melakukan sendiri pilihannya untuk menentukan dan melakukan usaha yang sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya, untuk menolong dirinya sendiri secara bersama-sama.

Koperasi pada mulanya tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya pikiran-pikiran tentang pembaharuan masyarakat, yang

¹⁶ Andjar Pachta W, Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: BPFHUI, 2005), hal. 47

terutama diperoleh oleh aliran gerakan sosialis. Aliran ini sangat kuat pengaruhnya dalam pertumbuhan koperasi, karena :

- a. Koperasi membentuk suatu dasar bagi organisasi kemasyarakatan yang berbeda dengan bentuk dan cita-cita sistem kapitalisme yang berkuasa di banyak negara barat pada waktu itu. Motif utama sistem kapitalis adalah mencapai laba yang sebesar-besarnya, sehingga sistem ini menimbulkan akibat yang berat dari kaum buruh karena mereka menjadi kaum yang

ditindas. Oleh karena itu, gerakan sosialis berusaha melenyapkan penderitaan ini.

- b. Dengan munculnya perkumpulan koperasi, maka koperasi dianggap oleh gerakan sosialis sebagai cara praktis bagi kaum buruh dan produsen kecil untuk melepaskan diri dari penindasan kaum kapitalis. Oleh karena itu gerakan sosialis sangat menganjurkan berdirinya koperasi.

Bibit koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto pada tahun 1896. Waktu itu seorang pamong praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang di beri nama "*Hulph-en Spaar Bank*" (Bank Pertolongan dan Simpanan). Bank ini dimaksudkan untuk menolong para priyayi/pegawai negeri yang terjerat utang pada lintah darat. Bank ini meminjamkan kepada para pegawai negeri dengan bunga yang rendah dari dana yang dikumpulkan oleh para pegawai itu sendiri. Usaha Wiria Atmaja ini kemudian dibantu dan diteruskan oleh Asisten Residen Belanda De Wolf van Westerorde yang telah mempelajari koperasi sistem *Raffaisen* dan *Schulze Delitzch* di Jerman pada masa cutinya. Akan tetapi usaha De Wolf ini tidak banyak berhasil, karena :

- a. Ia terlalu tergesa-gesa menerapkan prinsip koperasi yang modern,
- b. Ekonomi kaum pribumi yang masih lemah,
- c. Adanya kecenderungan para pengurusnya, serta
- d. Halangan dari pemerintah Belanda.

Pemerintah Belanda menghalangi berkembangnya koperasi waktu itu karena takut organisasi koperasi diperalat untuk alat politik melawan

penjajah dan kemampuan rakyat dalam berorganisasi lewat koperasi dapat menjadi embrio kemampuan berorganisasi politik. Ternyata apa yang menjadi kekuatiran pemerintah Hindia Belanda ini, akhirnya memang menjadi kenyataan. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang disusul oleh Sarekat Dagang Islam (kemudian menjadi Serikat Islam) membangkitkan juga gerakan koperasi. Ke dua organisasi ini membangkitkan semangat rakyat dan mendorong pembentukan koperasi rumah tangga (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) dan koperasi konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri peningkatan taraf hidup.

Sekalipun terdapat kesulitan dalam mengembangkan koperasi pada periode ini yaitu karena kekurangan skill dan modal, namun banyak koperasi dikalangan pengusaha kecil, petani dan pegawai negeri berkembang pesat. Pada tahun 1939 jumlah koperasi telah mencapai 1712 dan yang terdaftar 172 dengan anggota sebanyak 14.134, karena kewalahan membendung gerakan koperasi di kalangan rakyat itu, maka pemerintah Hindia Belanda bermaksud mengaturnya. Dan akhirnya keluarlah undang-undang tentang koperasi yang dikenal dengan nama *Verodening op de Cooperatieve Verenigingen* pada tahun 1915. Akan tetapi karena undang-undang ini berkiblat pada hukum perniagaan eropa, maka lebih banyak menghambat daripada mendorong pertumbuhan koperasi. Salah satu contohnya adalah undang-undang itu pada salah satu pasal-pasal nya menyebutkan bahwa akta atau rancangan pendirian

koperasi harus diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jenderal dengan rakyat kecil yang dijajah sangatlah jauh, maka berarti mendapatkan akta pendirian koperasi tidaklah mudah.

Melihat hal ini kaum nasionalis mendesak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap undang-undang tersebut. Permintaan ini dikabulkan, sehingga Belanda pada tahun 1920 membentuk Komisi Koperasi yang diketuai oleh Prof. DR. JH. Boeke. Setelah bekerja selama 7 tahun, komisi ini melahirkan “Ordonansi Perkumpulan Koperasi Bumiputera” pada tahun 1927. Ordonansi ini sudah lebih maju karena dikatakan dalam salah satu pasalnya bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang Indonesia sehingga baginya berlaku Hukum Sipil dan Hukum Dagang Indonesia. Dengan demikian akta pendirian tidak diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jenderal lagi, melainkan oleh “Penasihat Urusan Perkreditan Rakyat dan Koperasi”. Koperasi berkembang dengan cepat waktu itu, namun karena depresi dunia, maka pada tahun 1932 banyak koperasi yang mati.

Ketika Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942 dan mengambil alih penjajahan dari Belanda, didirikanlah oleh pemerintah Jepang semacam koperasi yang disebut *kumiai*. Pendirian *kumiai* itu bisa diduga untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Dalam kenyataannya *kumiai* ini hanyalah alat untuk memeras rakyat Indonesia. *kumiai* hanyalah alat untuk mengumpulkan kebutuhan perang tentara Jepang dari rakyat Indonesia, dengan cara membeli secara paksa hasil-hasil bumi rakyat dengan harga

sangat murah. Karena hal ini, maka kepercayaan rakyat terhadap koperasi ala Jepang makin memudar.

Pada saat awal Indonesia merdeka, para pengurus *kumiai* mengubah *kumiai* menjadi koperasi, karena Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) secara tegas menyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan dan usaha bersama adalah koperasi. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947, di Tasikmalaya diselenggarakan Kongres Koperasi Indonesia yang pertama (hari koperasi pertama), menghasilkan beberapa keputusan, yaitu:

- a. Membentuk organisasi yang diberi nama Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI).
- b. Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia yang tiap tahun harus diperingati.
- c. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi.
- d. Mengusahakan koperasi desa sebagai dasar untuk memperkuat susunan perekonomian.
- e. Mengusahakan berdirinya bank koperasi untuk mengorganisasi permodalan koperasi,.
- f. Memperhebat dan memperluas pendidikan di kalangan pengurus dan pegawai koperasi serta di kalangan masyarakat.

Pada periode 1950-1960 atau yang lebih dikenal sebagai periode ekonomi liberal, koperasi harus berjuang susah payah melawan kekuatan ekonomi lain, sementara bantuan dari pemerintah belumlah mencukupi. Maka pada periode ini banyak koperasi macet. Namun demikian pada periode ini sudah nampak adanya konsolidasi organisasi koperasi dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Pada periode ini, tepatnya pada tanggal 12 Juli 1953 dalam Kongres Koperasi Indonesia II di Bandung, telah ditetapkan antara lain;

- a. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI) sebagai pengganti SOKRI.
- b. Menetapkan pendidikan koperasi sebagai satu pelajaran di sekolah-sekolah lanjutan.
- c. Dr. Moh. Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia atas jasa beliau mengembangkan perkoperasian di Indonesia.¹⁷

3. Pengertian Koperasi

Dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Sedangkan dalam bahasa inggris, koperasi berasal dari kata *Co* dan *Operation*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging*, yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

¹⁷ Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), Hal. 38-42.

Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan

istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.¹⁸

Dasar hukum keberadaan koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) dikemukakan bahwa perekonomian Indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Menurut ILO (International Labour Organization) Recommendation Nomor 127, 1966 pada paragraph 12 (a) mengatakan tentang definisi koperasi, yaitu suatu perkumpulan orang-orang yang secara sukarela berhimpun bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, memberi sumbangan yang wajar di dalam modal yang diperlukan dan menerima bagian

¹⁸ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 1
yang wajar dalam penanggungan resiko dan manfaat dari perusahaan di dalam mana para anggota berperan secara aktif.¹⁹

Di Indonesia pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, di jelaskan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 bagian kesatu, dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Koperasi di Indonesia, tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan sebagaimana halnya perusahaan perseorangan, perusahaan Firma, atau pun Perseroan Terbatas. Perbedaan antara koperasi dengan non koperasi ditinjau dari kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan usaha adalah dalam koperasi terdapat alat kelengkapan koperasi yang disebut Rapat Anggota, sedangkan pada non koperasi kekuasaan berada pada para pemegang saham. Perbedaan koperasi dengan non koperasi ditinjau dari dimensi kemanfaatan usaha, adalah koperasi usahanya bermanfaat bagi anggotanya dan juga bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan non koperasi

¹⁹ Sudarsono, dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 11-12

kemanfaatan usahanya tertuju kepada pemilik-pemilik modal. Pada koperasi tidak mementingkan keuntungan yang besar, koperasi juga merupakan suatu bentuk perusahaan yang memiliki asas dan prinsip tersendiri, berbeda dengan non koperasi yang tujuan usahanya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya.²⁰ Koperasi di Indonesia, juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan koperasi yang dikemukakan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diketahui beberapa hal mengenai koperasi, yaitu :

- a. Koperasi didirikan atas dasar adanya kesamaan kebutuhan di antara para anggotanya. Kebutuhan yang sama ini selanjutnya diusahakan pemenuhannya melalui pembentukan koperasi. Dengan adanya koperasi yang dimiliki secara bersama-sama ini, maka diharapkan kebutuhan-kebutuhan itu dapat dipenuhi dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan dilakukan oleh masing-masing anggota secara perorangan;

²⁰ Sudarsono, dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 7-8

-
- ~~b. Koperasi didirikan atas dasar kesadaran mengenai keterbatasan~~
kemampuan. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk menyatukan diri demi kepentingan bersama;
 - c. Koperasi didirikan atas dasar kesukarelaan dan keterbukaan. Tidak boleh ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi. Persyaratan yang dipentingkan untuk menjadi anggota koperasi bukanlah status sosial ataupun jenis pekerjaan;
 - d. Koperasi menjunjung tinggi asas demokrasi. Koperasi dimiliki, dikelola, diatur, dan diawasi secara bersama-sama oleh para anggotanya, sesuai dengan keinginan para anggota koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, kerja sama diantara sesama anggota koperasi dilakukan atas dasar pengakuan akan adanya kesamaan derajat, serta kesamaan hak dan kewajiban. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama;
 - e. Koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya atas dasar perikemanusiaan. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan yang

diperjuangkan oleh koperasi adalah peningkatan kesejahteraan anggota atas dasar kemanusiaan, bukan atas dasar kebendaan belaka;

- f. Koperasi melakukan usaha dan kegiatannya di bidang yang dapat memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya. Kegiatan ini dapat meliputi usaha di bidang produksi, konsumsi, maupun usaha pemberian jasa seperti usaha simpan pinjam, asuransi, dan lain sebagainya;
- g. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan, bukan perkumpulan modal. Sebagai gerakan ekonomi rakyat, koperasi berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun koperasi juga mencari keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Yang lebih diutamakan oleh koperasi adalah pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat disekitarnya;
- h. Koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Tujuan itu dicapai melalui karya dan jasa masing-masing anggota yang dipersatukan kedalam koperasi. Keikutsertaan tiap-tiap anggota dalam menyumbangkan hasil karya dan jasanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Hal itu kemudian harus tercermin dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi;

- i. Koperasi, selain beranggotakan orang-orang, dapat pula beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Beberapa koperasi yang memiliki bidang usaha yang sama, yang masing-masing berkedudukan sebagai badan hukum koperasi, menyatukan diri dalam wadah koperasi yang lebih besar. Masing-masing koperasi mempunyai pengurus, pengawas, serta anggaran dasar masing-masing. Melalui penggabungan atau penyatuan usaha ini maka skala usaha dapat diperbesar sehingga memungkinkan tercapainya peningkatan efisien usaha yang lebih besar pula;
- j. Koperasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjuangan membangun sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi memainkan peranan yang sangat penting bagi terwujudnya sistem perekonomian yang menjamin pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota koperasi, maupun bagi masyarakat pada umumnya.²¹

Dalam garis besarnya, Koperasi pada umumnya dipahami sebagai perkumpulan orang-orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan

²¹ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal. 8-12. kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan suatu perusahaan yang dikelola secara demokratis.

Koperasi tidak hanya memiliki arti penting bagi para anggotanya, akan tetapi juga mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat disekitarnya. Koperasi sebagai wadah bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas untuk memperjuangkan ekonomi masyarakat tersebut, berarti koperasi secara tidak langsung turut memainkan peranan dalam proses pemerataan pembangunan, dan sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi juga diharapkan dapat memainkan peranannya sebagai suatu gerakan untuk menyusun perekonomian Indonesia, yaitu sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

4. Landasan Dasar Koperasi.

Untuk memujudkan tujuan nasional yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dengan koperasi.²² Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta

²² R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 31

berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Faktor utama yang menentukan terbentuknya koperasi adalah adanya sekelompok orang yang telah seia sekata untuk mengadakan kerja sama. Oleh karena itu, landasan koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti, sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat.

Landasan-landasan koperasi dapat di bagi menjadi 3 (tiga) hal, antara lain

:

a. Landasan Idiil Koperasi Indonesia

Yang dimaksud dengan landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Sesuai dengan Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, landasan idiil koperasi adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan semangat bangsa Indonesia didalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia di dalam kehidupan sehari-hari.

Pancasila dengan masing-masing silanya, akan menjadi pedoman yang mengarahkan semua tindakan koperasi dan organisasi-organisasi lainnya itu di dalam mengembangkan fungsinya masing-masing di tengah-tengah masyarakat.

b. Landasan struktural dan landasan gerak Koperasi Indonesia

Pada Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) sebagai landasan struktural, sedangkan Pasal 33 Ayat (1) merupakan landasan gerak Koperasi, artinya : ketentuan-ketentuan yang terperinci tentang Koperasi Indonesia harus berlandaskan dan bertitik tolak dari jiwa Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 (UUD N RI 1945). Di dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) ini hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok perekonomian.

Semangat usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan itu, pada mulanya adalah semangat koperasi. Semangat koperasi itulah yang kemudian diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945). Di dalam penjelasan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) dikemukakan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan susunan perekonomian usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan itu adalah koperasi.

Didalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) hanya memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang perekonomian Indonesia, maka penunjukan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan jiwa pasal tersebut perlu dijabarkan lebih rinci. Untuk itu diperlukan adanya Undang-Undang tentang perkoperasian. Undang-Undang yang mengatur koperasi harus bertitik tolak dari ketentuan dan semangat yang terkandung di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945). Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) mengatur perikehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang di dalam gerak pelaksanaannya didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi. Artinya, usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi warga negara Indonesia harus dilakukan melalui usaha bersama diantara para anggota

masyarakat. Dengan demikian kegiatan ekonomi merupakan kegiatan untuk mencapai kepentingan ekonomi bersama melalui suatu organisasi kerja sama, yang bergerak di bawah pimpinan dan pengawasan secara demokratis oleh anggota masyarakat, tujuannya adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang sebesar-besarnya.²³

c. Landasan Mental Koperasi

Ada 2 (dua) landasan mental didalam koperasi, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi. Kedua landasan tersebut harus bersatu padu, saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan berkoperasi, keduanya diperlukan sebagai dua unsur yang dorong mendorong, hidup menghidupi dan awas mengawasi. Kegotongroyongan yang ada hingga kini adalah warisan nenek moyang, dan inilah wujud setia kawan yang sudah lama ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Tapi itu tidak cukup digunakan sebagai landasan mental dalam hidup berkoperasi. Diperlukan faktor dukungan lainnya sehingga dapat menaikkan derajat penghidupan dan kemakmuran. Dan faktor tersebut adalah kesadaran bahwa kita

²³ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal: 43-45.
sebagai manusia Indonesia yang berkepribadian dan memiliki harga diri
serta percaya pada kemampuan diri sendiri.²⁴

5. Asas Koperasi Indonesia.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, Pasal 2 menyatakan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), serta berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk-bentuk perusahaan lain tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya.

Warga negara Indonesia mengakui kodrat kemanusiaan sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif dan daya kreasi, yang harus dikembangkan secara selaras, serasi dan seimbang didalam kehidupan masyarakat. hal ini adalah demi tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan. Setiap warga negara Indonesia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik bila tidak bekerjasama dengan anggota masyarakat lainnya. Kesadaran itulah yang mendorong tumbuhnya sikap mental yang mengarah pada semangat kekeluargaan. Dengan semangat kekeluargaan sebagai asas koperasi , maka diharapkan

²⁴ Sudarsono, dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), hal. 79

dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang terlibat dalam organisasi koperasi, untuk senantiasa bekerjasama dengan anggota-anggota koperasi lainnya, dengan rasa setia kawan yang tinggi.²⁵

Rasa setia kawan yang tinggi ini sangat penting artinya bagi perkembangan usaha koperasi. Sebab rasa setia kawan akan mendorong setiap anggota koperasi untuk merasa sebagai satu keluarga besar yang senasib dan sepenanggungan dalam memenuhi hajat hidupnya. Rasa setia kawan ini telah

lama ada dalam masyarakat Indonesia. Sifat itu antara lain juga terwujud dalam bentuk gotong royong. Dalam pengembangan koperasi, rasa setia kawan harus didukung oleh unsur penting lainnya, yaitu adanya kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri.

6. Tujuan Koperasi

Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun demikian karena dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya itu Koperasi berpegang pada asas dan prinsip-prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya juga diharapkan

²⁵ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal: 45-47.
dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Tujuan koperasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut :

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Berdasarkan bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 itu, dapat disaksikan bahwa tujuan Koperasi adalah :

- a. Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya,
- b. Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, dan
- c. Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional.²⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota, serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945).

Agar koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan

²⁶ Undang-Undang Koperasi, UU No.25 Tahun 1992, Pasal 3

²⁷ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal: 48
pendiriannya, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 kemudian menggariskan fungsi dan peran yang harus diemban oleh koperasi didalam pembangunan perekonomian Indonesia. Tujuannya adalah agar pengembangan koperasi di Indonesia dapat memiliki arah yang jelas.

7. Fungsi dan Peran Koperasi di Indonesia

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dikemukakan bahwa fungsi dan peran koperasi Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga memungkinkan terbentuknya kekuatan yang lebih besar sebagai akibat dari penggabungan potensi-potensi individual.

Dengan terhimpun potensi dan kemampuan yang lebih besar di dalam wadah koperasi, maka koperasi memiliki kekuatan untuk mengembangkan potensi secara optimal. Koperasi memiliki peluang untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya.

- b. Berperanserta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

Selain diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya, koperasi juga diharapkan juga diharapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerja sama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan ini hanya bisa dicapai oleh koperasi bila koperasi dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggota koperasi serta masyarakat disekitarnya. Oleh karena itu pada tahap pertama, pelaksanaan usaha koperasi harus benar-benar diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Setelah itu, dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan ekonomi para anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka pada tahap berikutnya koperasi akan memiliki peluang untuk turut serta meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat disekitarnya.

Partisipasi aktif para anggota koperasi didalam pengelolaan usaha perusahaannya, secara tidak langsung adalah salah satu bentuk dari pendidikan praktis mengenai manajemen usaha koperasi kepada para anggotanya. Oleh karena itu, melalui pendidikan pengelolaan koperasi itu, para anggota koperasi itu akan memperoleh pengalaman yang sangat tinggi nilainya didalam pengembangan potensi dan inisiatif pribadinya.

- c. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;

Sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), perekonomian nasional Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi, yang dipentingkan adalah kemakmuran semua orang, bukan orang-seorang.

Berkaitan dengan susunan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, maka koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang sesuai dengan susunan perekonomian nasional. Penyebabnya tidak lain karena koperasi itu adalah satu-satunya perusahaan yang dikelola secara demokratis. Dengan sifatnya itu maka koperasi itu diharapkan dapat memainkan peranannya dalam memperkokoh perekonomian rakyat.

Dalam rangka memperkokoh perekonomian rakyat itu, maka koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh. Sebab dengan cara itu koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan

perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Namun karena koperasi mempunyai sifat khusus yang berbeda dari sifat bentuk perusahaan lainnya, yaitu sebagai mana tercermin didalam asas, tujuan, prinsip, dan fungsi serta peranannya, maka koperasi menempati kedudukan yang sangat terhormat dalam sistem perekonomian Indonesia.²⁸

²⁸ Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal: 81-84.

Tanggung jawab untuk membangun susunan perekonomian nasional sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagian besar terletak dipundak koperasi.

8. Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Koperasi terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, ataupun agama.

b. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi;

Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itu yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

Penerapan prinsip demokrasi di dalam koperasi dilakukan dengan mengupayakan keterlibatan sebanyak mungkin anggota koperasi di dalam proses pengambilan keputusan koperasi. Dalam proses pengambilan keputusan itu, tiap-tiap anggota harus diperlakukan sama dan dalam suasana kebersamaan. Prinsip kesamaan dan kebersamaan ini merupakan unsur penting dalam kehidupan koperasi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992: setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar.

Koperasi didirikan oleh para anggota yang mempunyai tekad yang sama yaitu meningkatkan kesejahteraan bersama. Usaha koperasi dijalankan oleh anggota yang mempunyai kecakapan. Pengawasan usaha koperasi juga dilakukan oleh anggota. Dengan demikian kedudukan anggota koperasi didalam pengelolaan usaha koperasi adalah sekaligus sebagai pemilik, pengelola, dan pengawas koperasi.

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

Pembagian sisa hasil usaha kepada dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

Praktik pembagian sisa hasil usaha merupakan praktik usaha koperasi yang berbeda dengan praktik perusahaan-perusahaan lainnya. Pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada para anggotanya didasarkan atas pertimbangan jasa masing-masing anggota didalam usaha koperasi yaitu yang dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota didalam keseluruhan volume usaha koperasi.

Praktik semacam ini berbeda dengan praktik pengelolaan badan usaha bukan koperasi. Keuntungan perseroan misalnya, dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan pertimbangan relatif kepemilikan saham. Dengan demikian, koperasi benar-benar mencerminkan kerja sama orang-orang yang tidak hanya mementingkan akumulasi modal semata. Cara koperasi membagikan sisa hasil usaha ini membuktikan bahwa koperasi adalah usaha yang menjunjung tinggi persamaan derajat diantara anggota.

d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal;

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar.

Adanya pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi selain mencari keuntungan juga mendorong tumbuhnya rasa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi. Disamping itu, hal itu juga menunjukkan bahwa didalam jiwa tiap-tiap anggota koperasi tumbuh rasa solidaritas untuk saling tolong menolong antara anggota yang kuat terhadap anggota yang lemah. Sehingga setiap anggota yang mengalami kesulitan ekonomi, tetap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ekonominya.

e. Kemandirian.

Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Salah satu sasaran utama pembangunan koperasi di Indonesia adalah peningkatan kemandiriannya. Untuk bisa mandiri, koperasi harus mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat didalam kehidupan masyarakat. Supaya koperasi dapat mengakar dalam kehidupan masyarakat maka keberadaan koperasi harus dapat diterima oleh masyarakat. Supaya dapat diterima oleh masyarakat maka koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.²⁹

Sedangkan didalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. Pendidikan perkoperasian;
- b. Kerjasama antar koperasi.

²⁹ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), hal: 57-59

Penyelenggaraan pendidikan perkoperasian dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip koperasi yang penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi. Kerjasama ini dimaksud dapat dilakukan antar koperasi di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Dengan pendidikan ini diharapkan para anggotanya memiliki pengertian tentang seluk beluk dan lika liku koperasi, dan dari pengertian yang diperoleh tersebut akan tumbuh kesadaran berkoperasi dan kesetiaan pada koperasi pada diri dan jiwa para anggota koperasi, yang dapat meningkatkan taraf partisipasi anggota terhadap koperasi. Sedangkan kerjasama antar koperasi ini akan dapat memperkuat dan memperkokoh koperasi sebagai sesuatu badan usaha ekonomi dalam membangun tatanan perekonomian nasional, sehingga dapat mewujudkan keinginan dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945) dimana koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia.³⁰

³⁰ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 51

9. Bentuk dan Jenis Koperasi Indonesia

Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer atau koperasi sekunder.³¹ koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, sedangkan Koperasi sekunder adalah koperasi yang oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Jika dilihat dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok koperasi beserta penjelasannya, maka terdapat adanya empat tingkatan organisasi koperasi yang didasarkan atau disesuaikan dengan tingkat daerah administrasi pemerintahan. Empat tingkatan koperasi tersebut adalah :

³¹ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 59

- a. Induk koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya tiga gabungan koperasi yang berbadan hukum. Induk koperasi ini daerah kerjanya adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia (tingkat Nasional);
- b. Gabungan koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya tiga gabungan koperasi yang berbadan hukum. Gabungan koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat I (tingkat propinsi);

- c. Pusat koperasi, terdiri dari sekurang-kurangnya lima koperasi primer yang berbadan hukum. Pusat koperasi ini daerah kerjanya adalah Daerah Tingkat II (tingkat kabupaten);
- d. Koperasi primer, terdiri dari sekurang-kurangnya duapuluh orang yang telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Dengan tingkatan organisasi koperasi seperti tersebut, maka koperasi tingkat atas mempunyai kewajiban memberikan bimbingan dan mempunyai wewenang untuk mengadakan pemeriksaan pada koperasi tingkat bawah, dengan tanpa mengurangi hak koperasi tingkat bawah.

Adanya kerjasama yang baik di dalam organisasi koperasi dari tingkat pusat sampai pada tingkat bawah, maka akan dapat memajukan usaha koperasi.

Dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dinyatakan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut, mengenai jenis koperasi diuraikan sebagai berikut: dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa.

Jenis koperasi di Indonesia, berdasarkan sejarah timbulnya gerakan koperasi adalah:

- a. Koperasi Konsumsi;
- b. Koperasi Kredit;

c. Koperasi Produksi.

Sedangkan jenis koperasi berdasarkan lapangan usaha/tempat tinggal anggotanya, adalah:

- a. Koperasi Desa, anggotanya para penduduk desa yang memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dalam koperasi, dan menjalankan aneka usaha dalam suatu lingkungan tertentu.
- b. Koperasi Unit Desa, merupakan gabungan koperasi-koperasi pertanian atau koperasi desa dalam wilayah unit desa, yang kemudian dilebur menjadi Koperasi Unit Desa. Koperasi Unit Desa ini merupakan organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan serta memberikan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat pedesaan.
- c. Koperasi Konsumen, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi. Koperasi jenis ini biasanya menjalankan usahanya untuk mencapai kebutuhan sehari-hari para anggotanya dan masyarakat sekitarnya.
- d. Koperasi Pertanian, yaitu koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani-petani atau buruh tani, atau orang-orang yang mata pencahariannya berkaitan dengan usaha pertanian.
- e. Koperasi Peternakan, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak, pengusaha peternakan, buruh peternakan, atau orang-orang yang mata pencahariannya berkaitan dengan usaha peternakan.

- f. Koperasi Perikanan, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari para peternak ikan, pengusaha perikanan, pemilik kolam ikan, pemilik alat perikanan, nelayan, serta pihak-pihak yang berhubungan dengan usaha perikanan.
- g. Koperasi Kerajinan/Koperasi Industri, yaitu koperasi yang terdiri dari para pengusaha kerajinan dan industri, serta buruh yang berkepentingan yang mata pencahariannya berhubungan dengan kerajinan dan industri.
- h. Koperasi Simpan Pinjam, yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal perkreditan/simpan pinjam.

Berdasarkan pendekatan menurut golongan fungsional, maka dikenal jenis-jenis koperasi sebagai berikut:

- a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN);
- b. Koperasi Angkatan Darat (KOPAD);
- c. Koperasi Angkatan Laut (KOPAL);
- d. Koperasi Angkatan Udara (KOPAU);
- e. Koperasi Angkatan Kepolisian (KOPAK);
- f. Koperasi Pensiunan Angkatan Darat;
- g. Koperasi Karyawan;
- h. Koperasi Pensiunan Pegawai Negeri.³²

³² R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 62-65.

10. Perangkat Organisasi Koperasi

Koperasi sebagai organisasi ekonomi, artinya adalah bahwa koperasi adalah sebuah perkumpulan yang bergerak dalam bidang perekonomian untuk rakyat yang miskin dan lemah ekonominya. Sehubungan dengan adanya pengelolaan koperasi, maka setiap anggota koperasi mempunyai hak yang sama, dan mempunyai hak suara yaitu satu orang satu suara. Jika tidak tercapai kata sepakat dalam rapat, maka harus diputuskan dengan pemungutan suara. Disinilah terlihat praktek demokrasi berlaku di dalam koperasi. Setiap anggota koperasi harus ikut serta secara aktif dalam kegiatan usaha koperasinya.

Menurut ketentuan didalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari Rapat Anggota, Pengurus dan Pengawas.

a. Rapat Anggota;

Menurut ketentuan didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Selanjutnya didalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ditentukan bahwa keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Dalam hal dilakukan berdasarkan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. Hak suara dalam koperasi sekunder dapat diatur dalam anggaran dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha koperasi-koperasi secara berimbang. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ditentukan bahwa Rapat Anggota diadakan paling sedikit sekali

dalam 1 (satu) tahun. Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.

Kewenangan dan hak Rapat Anggota diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Menurut ketentuan Pasal 23, Rapat Anggota menetapkan :

- 1) Anggaran dasar;
- 2) Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi;
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- 6) Pembagian sisa hasil usaha;
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Selain kewenangan tersebut, dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, menerangkan bahwa Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

b. Pengurus Koperasi;

Menurut ketentuan didalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Untuk pertama kali, susunan data nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.

Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam anggaran dasar. Pengurus koperasi bertugas mengelola koperasi dan usahanya, mengajukan rancangan rencana-rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memelihara daftar buku anggota dan pengurus, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib.

Didalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dijelaskan bahwa pengurus koperasi berwenang mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan, memutuskan dalam penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Di samping itu, pengurus juga berwenang melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada Rapat Anggota.

Pengurus, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

c. Pengawas Koperasi.

Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota. Karena itu, pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. Sedangkan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.³³

11.Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Setiap anggota koperasi harus ikut secara aktif melaksanakan kegiatan usaha koperasinya. Disamping itu, para anggota koperasi juga diharuskan untuk membayar uang simpanan pokok dan simpanan wajib serta membeli barang-barang pada koperasinya tersebut. Keanggotaan seseorang pada koperasi ditentukan setelah

³³ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), Hal. 102-106.

orang tersebut mendaftarkan dirinya sebagai anggota dan telah membayar uang simpanan pokok pada koperasi. Uang simpanan pokok adalah merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang ingin menjadi anggota koperasi.

Menurut Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 bahwa anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengusaha jasa koperasi. Sedangkan di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berbunyi :

- a. Yang dapat menjadi anggota koperasi adalah setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan di dalam anggaran dasar;
- b. Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan hak dan kewajibannya ditetapkan dalam anggaran dasarnya.

Keanggotaan koperasi ini didasarkan kepada kesamaan kepentingan. Setiap anggota mempunyai hak yang sama, termasuk hak untuk memberikan suara di dalam rapat anggota.

Kewajiban dari anggota koperasi adalah antara lain :

- a. Mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi serta keputusan yang disahkan didalam Rapat Anggota Tahunan,
- b. Menjadi pelanggan tetap koperasi,
- c. Memodali koperasi,
- d. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas dasar kekeluargaan.³⁴

Hak anggota koperasi adalah, antara lain :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota,
- b. Memilih dan /atau dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas koperasi,
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota,
- d. Mengemukakan pendapat dan saran-saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota, baik diminta maupun tidak diminta,
- e. Mendapatkan pelayanan yang sama antara sesama anggota koperasi

³⁴ Buku Panduan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Brebes, Hal. 5.

- f. Melakukan pengawasan atas jalannya koperasi dan usaha-usaha koperasi menurut ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, ³⁵
- g. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi,
- h. Menyetujui dan atau mengubah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan lainnya. ³⁶

12. Proses Pendirian Koperasi Indonesia

- a. Fase Pembentukan/Pendirian**

Koperasi sebagai suatu badan usaha, adalah merupakan suatu bentuk perhimpunan orang-orang dan/atau badan hukum koperasi yang mempunyai kepentingan yang sama. Oleh karena itu, koperasi biasanya didirikan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan yang terbatas, yang mempunyai keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan cara bergotong royong, maka prosedur atau persyaratan

³⁵ Sagimun M.D., *Koperasi Soko Guru Ekonomi Nasional Indonesia Cetakan III*, (Jakarta, 1989), Hal. 205.

³⁶ Buku Panduan Dinas Koperasi Dan UMKM Kabupaten Brebes, Hal. 5.
pendiriannyapun diusahakan sesederhana mungkin, tidak berbelit-belit, dengan persyaratan modal yang relatif kecil dan tanpa dipungut biaya yang tinggi.³⁷

Persyaratan untuk mendirikan koperasi yang biasanya tertuang dalam undang-undang ataupun peraturan koperasi antara lain :

- 1) Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai kepentingan ekonomi yang sama;
- 2) Orang-orang yang akan mendirikan koperasi harus mempunyai tujuan yang sama;
- 3) Harus memenuhi syarat jumlah minimum anggota;
- 4) Harus memenuhi persyaratan wilayah tertentu;
- 5) Harus telah dibuat konsep anggaran dasar koperasi

Setelah itu yang dilakukan berikutnya adalah:.

- 1) Mengadakan pertemuan pendahuluan diantara orang-orang yang ingin mendirikan koperasi
- 2) Mengadakan penelitian mengenai lingkungan daerah kerja koperasi

³⁷ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 66.

- 3) Mengadakan hubungan dengan kantor Departemen Koperasi setempat
- 4) Membentuk panitia pendirian koperasi yang bertugas mempersiapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- 5) Mengadakan rapat pembentukan koperasi. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam rapat pembentukan koperasi ini adalah :
 - a) Memilih pengurus
 - b) Memilih pengawas dan
 - c) Menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- 6) Mengajukan permohonan status badan hukum koperasi dengan melampirkan petikan berita acara pembentukan koperasi serta daftar nama anggota pengurus dan pengawas.³⁸

³⁸ Revrisond Baswir, *Koperasi Indonesia Edisi I*, (Yogyakarta: BPFE, 1997), Hal. 114-115.

b. Fase Pengesahan

Atas dasar permohonan pengesahan yang disampaikan oleh pengurus koperasi secara tertulis tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan, pejabat yang bersangkutan harus memberikan putusan apakah permohonan tersebut diterima ataukah ditolak.

Jika permohonan pengesahan ini ditolak, alasan-alasan penolakan harus diberitahukan secara tertulis kepada para pendiri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengesahan. Dalam hal terjadi penolakan permohonan pengesahan, para pendiri/pengurus dapat mengajukan permohonan ulang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan permohonan tersebut. Keputusan terhadap pengajuan permohonan ulang ini, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permohonan ulang tersebut.

Namun jika permohonan pengesahan tersebut diterima, maka sejak saat itu koperasi tersebut berstatus sebagai badan hukum. Pengesahan ini ditandai dengan diumumkannya akta pendirian koperasi tersebut (yang didalamnya termuat pula anggaran dasarnya), ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan diperolehnya status sebagai badan hukum, maka secara hukum koperasi tersebut telah diakui keberadaannya seperti orang yang mempunyai kecakapan untuk bertindak, memiliki wewenang untuk mempunyai harta kekayaan, melakukan perbuatan-perbuatan hukum,

seperti membuat perjanjian, menggugat dan digugat dimuka pengadilan, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, sebagai suatu badan hukum maka koperasi juga merupakan subjek hukum. Namun demikian, sebagai suatu subjek hukum, koperasi adalah merupakan subjek hukum abstrak, yang keberadaannya atas rekayasa manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Karena merupakan subjek hukum abstrak, maka di dalam menjalankan atau melakukan perbuatan-perbuatan hukum, koperasi diwakili oleh perangkat organisasi yang ada padanya, yaitu pengurus.³⁹

³⁹ R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal. 68-69

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi

1. Pembuatan Akta Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1992

Mengenai tata cara pembentukan koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur ketentuan sebagai berikut :

a. Syarat pembentukan koperasi, antara lain :

- 1) Untuk koperasi primer, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang,
- 2) Sedangkan untuk koperasi sekunder, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi,
- 3) Pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar,
- 4) Koperasi mempunyai tempat kedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia,
- 5) Anggaran Dasar koperasi memuat sekurang-kurangnya : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai Rapat Anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, dan ketentuan mengenai sanksi.⁴⁰

b. Status badan hukum koperasi

- 1) Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah,
- 2) Untuk mendapatkan pengesahan, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi,

⁴⁰ Undang-Undang Koperasi, UU No.25 Tahun 1992, Pasal 6-8.

- 3) Pengesahan akta pendirian koperasi diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan,
- 4) Pengesahan akta pendirian koperasi diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia,
- 5) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, maka alasan penolakan tersebut harus diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan,
- 6) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian koperasi, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan tersebut,
- 7) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang, diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang,
- 8) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendirian koperasi, dan perubahan Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.⁴¹

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri,
- b. Untuk mendapatkan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, maka para pendiri atau kuasa dari para pendiri mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan :
 - 1) 2 (dua) rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup,
 - 2) Berita acara rapat pembentukan koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada,

⁴¹ Undang-Undang Koperasi, UU No.25 Tahun 1992, Pasal 9-14.

- 3) Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok,

4) Rencana awal kegiatan usaha koperasi.

- c. Apabila permintaan pengesahan atas akta pendirian koperasi telah lengkap, maka kepada para pendiri atau kuasanya diberikan tanda terima,
- d. Menteri memberikan pengesahan terhadap akta pendirian koperasi, apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran Dasar koperasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan,
- e. Pengesahan atas akta pendirian koperasi ditetapkan dengan keputusan Menteri dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. surat keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan,
- f. Dalam hal permintaan pengesahan atas akta pendirian koperasi ditolak, maka keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap,
- g. Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan tersebut,
- h. Menteri memberikan keputusan terhadap permintaan ulang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap,
- i. Dalam hal pengesahan atas akta pendirian koperasi itu diberikan, Menteri menyampaikan surat keputusan pengesahan dan akta pendirian koperasi yang telah mendapatkan pernyataan pengesahan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan,
- j. Dalam hal permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi itu ditolak, Menteri menyampaikan keputusan penolakan serta alasannya kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan. Keputusan Menteri terhadap permintaan ulang tersebut merupakan putusan akhir.
- k. Apabila Menteri tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah diatur tersebut, maka pengesahan atas akta

pendirian koperasi diberikan berdasarkan kekuatan Peraturan Pemerintah ini.⁴²

2. Tata Cara Pengangkatan Notaris Pembuat Akta Koperasi Menurut Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004

Di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 memuat ketentuan-ketentuan antara lain ;

Setiap notaris yang akan membuat akta koperasi, harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat di dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi. Pada Pasal 4 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris,
- b. Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri.

⁴² Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994

Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi bertugas memberikan pelayanan dalam proses pembuatan akta pendirian koperasi, perubahan Anggaran Dasar koperasi, pembubaran koperasi serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi serta bertanggungjawab atas otentisitas akta-akta yang dibuatnya. Yang dimaksud dengan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan perkoperasian adalah Berita Acara Rapat Anggota Koperasi.

Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, notaris tersebut harus terlebih dahulu mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian dengan bukti dikeluarkannya sertifikat yang ditandatangani oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM. Maksud dilakukannya pembekalan adalah diharapkan bahwa para notaris peserta pembekalan tentang perkoperasian dapat mengikuti pembekalan dengan sungguh-sungguh supaya kelak dapat membantu memberikan nasihat untuk laju perkembangan koperasi kedepannya. Sehingga keterlibatan notaris tidak sebatas dalam pembuatan akta koperasi saja, namun juga ikut peduli terhadap perkembangan koperasi kedepannya. Materi pembekalan yang diberikan kepada notaris antara lain meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dan proses pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi.

Setelah notaris mendapatkan sertifikat bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri, maka notaris tersebut harus melaporkan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi ditingkat kabupaten/kota dengan melampirkan :

- a. Surat Keputusan pengangkatan notaris,
- b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian,
- c. Alamat kantor beserta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap stempel notaris.

Selanjutnya, Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota memberikan tanda terima permohonan dan menyampaikan berkas pendaftaran tersebut kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Propinsi/D1 paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya permohonan secara resmi.

Setelah tahapan tersebut, Menteri Negara Koperasi dan UKM menetapkan Notaris sebagai Pejabat Pembuatan Akta Koperasi (PPAK) melalui Surat Keputusan Menteri yang disampaikan langsung kepada notaris yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,

Gubernur dan Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota pada tempat kedudukan notaris.

Notaris yang telah menerima Surat Keputusan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) dari Menteri Koperasi harus segera melaporkan kepada instansi koperasi di daerah kerjanya. Dalam waktu paling lambat 30 hari setelah diterimanya Surat Keputusan Penetapan, Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib menyampaikan fotokopi dan menunjukkan asli Surat Keputusan Menteri kepada Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat kabupaten/kota.

Selanjutnya notaris yang bersangkutan telah resmi terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di daerah kerja kabupaten/kota, dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta pendirian koperasi dan akta perubahan Anggaran Dasar koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, harus dibuat dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akta pendirian koperasi dan akta perubahan Anggaran Dasar koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, harus dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada para pendiri, anggota atau khususnya sebelum menandatangani akta.

Pembuatan akta pendirian koperasi dan akta perubahan Anggaran Dasar koperasi untuk koperasi primer dan sekunder di tingkat kabupaten/kota, propinsi ataupun nasional, merupakan kewenangan notaris sesuai dengan kedudukan kantor koperasi tersebut berada. Khusus untuk koperasi yang berkedudukan di Ibu Kota Jakarta, pembuatan akta koperasi dan perubahan Anggaran Dasar koperasi adalah kewenangan notaris yang berkedudukan di daerah khusus Ibukota Jakarta.

Akta pendirian koperasi dan akta perubahan Anggaran Dasar koperasi yang telah dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi disampaikan kepada Menteri atau pejabat yang berwenang untuk dimintakan pengesahannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa tempat kedudukan koperasi dan diketahui oleh Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi kabupaten/kota.

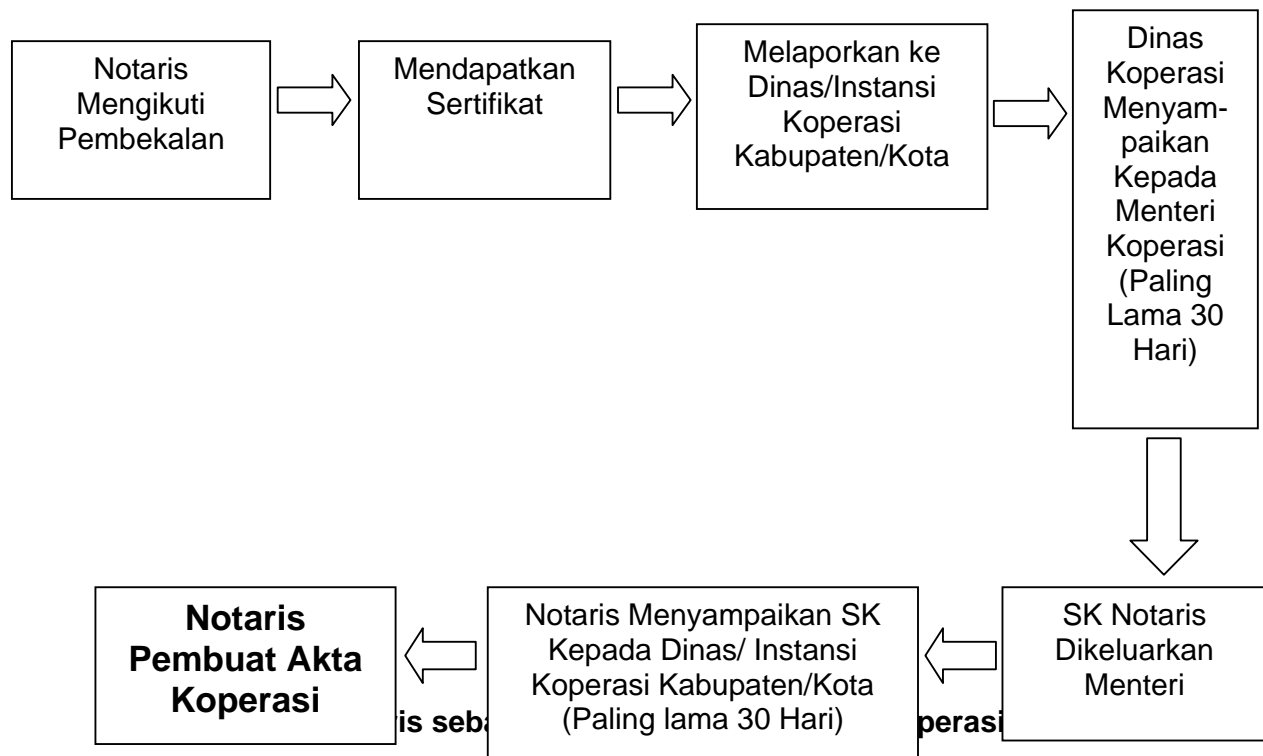
Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang di wilayah

kerjanya paling lambat pada bulan februari, setelah berakhirnya tahun yang telah berjalan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Dinas/Instansi yang membidangi koperasi dan UKM propinsi, kabupaten/kota berkewajiban mensosialisasikan pembuatan akta koperasi oleh notaris kepada koperasi di wilayah kerjanya. Maksudnya adalah bahwa pejabat koperasi harus mensosialisasikan nama-nama Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi.

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal

Gambar 1. Skema Pengangkatan Notaris Menjadi Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK).



Koperasi sebagai salah satu badan usaha di Indonesia sangat membutuhkan perangkat hukum yang dapat membantu perkembangan perekonomian nasional.

Dalam upaya pemerintah memberikan kekuatan dan jaminan kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian, maka telah dilakukan kerjasama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk pembuatan akta koperasi. Kerjasama tersebut tertuang didalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2004. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Republik Indonesia diwakili oleh Deputy Menteri Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang bernama DRS. Guritno Kusumo, M.M. Sedangkan yang mewakili notaris adalah Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang bernama Tien Norman Lubis, S.H dan Sekretaris Umum yang bernama Arry Supratno, S.H.

Mulai saat itu, kepastian hukum atas akta pendirian koperasi sudah bisa dipertanggungjawabkan oleh pendiri koperasi. Karena hanya dengan akta yang dibuat oleh notaris yang telah memiliki sertifikat dari Menteri Negara Koperasi dan UKM sebuah koperasi sudah bisa didirikan.⁴³

Selain untuk meningkatkan pelayanan hukum, Nota Kesepahaman ini juga dilatarbelakangi oleh kesulitan yang dialami Kementerian Negara Koperasi dan UKM karena keterbatasan tenaga sehingga seringkali pelayanan terhadap pengesahan pendirian koperasi menjadi terhambat dan memerlukan waktu yang sangat lama. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan proses pembuatan akta koperasi menjadi lebih mudah.⁴⁴

Sebagai langkah kongkrit dari adanya penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut, maka pada tanggal 24 September 2004 pemerintah dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM mengeluarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi.

⁴³ Hasil wawancara dengan notaris Suprihatin ,S.H. dan Farah Fauziah ,S.H.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan M. Salman Selaku Pegawai Dinas Koperasi Kabupaten Brebes

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Brebes, Dinas Koperasi dan UKM Kota Tegal, dan INI cabang Tegal, jumlah notaris yang berada di Kabupaten Brebes

sampai dengan Mei Tahun 2010 adalah berjumlah 20 (dua puluh) orang, namun yang telah mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian dan ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di kabupaten Brebes sampai dengan Mei Tahun 2010 adalah berjumlah 9 (Sembilan) orang, sedangkan jumlah notaris yang berada di Kota Tegal sampai dengan Mei Tahun 2010 adalah berjumlah 20 (dua puluh) orang, namun jumlah notaris yang telah mengikuti pembekalan dibidang perkoperasian dan ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di kota Tegal sampai dengan Mei Tahun 2010 adalah berjumlah 8 (delapan) orang.⁴⁵

Nama-nama Notaris Pembuat Akta Koperasi di kabupaten Brebes adalah :

- a. Nur Lailani, S.H.
- b. Deviyanti Rosita, S.H.
- c. Nurhalimah, S.H.
- d. Sih Amalia, S.H.
- e. Tri Sakti Handayani, S.H.
- f. Pasri Paturusi, S.H.

⁴⁵ Hasil wawancara dengan notaris Suprihatin ,S.H., Sekertariat INI Cabang Tegal, Dinas Koperasi Kota Tegal dan Dinas Koperasi Kabupaten Brebes.

- g. Nur Mufidah, S.H.

- h. Yuni Andaryanti, S.H.

- i. Retno Budi Yuniasih, S.H.⁴⁶

Nama-nama Notaris Pembuat Akta Koperasi di kota Tegal adalah :

- a. Siti Sopiah, S.H.
- b. Hertanti Pindayani, S.H.
- c. Ratna Witnoe, S.H.
- d. Sisriyoko, S.H.
- e. Farah Fauziah, S.H.
- f. Sri Rochani, S.H.
- g. Suprihatin, S.H.
- h. Hj. Chandra Puspasari Setyaningrum, S.H, M.Kn.⁴⁷

4. Perolehan Status Badan Hukum Koperasi

Akta pendirian dan anggaran dasar koperasi yang telah dibuat dan ditandatangani dihadapan notaris masih memerlukan pengesahan lagi dari pejabat yang berwenang. Pengesahan ini dimaksudkan untuk registrasi atau pencatatan di lembaga

⁴⁶ Hasil wawancara dengan M Salman Selaku Pegawai Dinas Koperasi Kabupaten Brebes.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Kartono ,S.H. Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Tegal. pemerintahan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Hal ini untuk memudahkan kantor koperasi melakukan

pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi-koperasi yang didirikan di Indonesia.⁴⁸

Setelah akta koperasi tersebut dibuat oleh notaris, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah pengesahan badan hukum koperasi. Kewenangan untuk mengesahkan badan hukum berada ditangan Menteri Negara Koperasi dan UKM, tetapi dalam pelaksanaannya kewenangan pengesahan tersebut dapat dilimpahkan melalui Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Propinsi dan Kabupaten/Kota, dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.

Pejabat yang berwenang untuk mengesahkan akta pendirian koperasi dan perubahan Anggaran Dasar koperasi, antara lain :

⁴⁸ Hasil wawancara dengan M Salman Selaku Pegawai Dinas Koperasi Kabupaten Brebes

a. Deputi bidang kelembagaan koperasi dan pengusaha kecil
menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas

nama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar kepada koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili lebih dari satu propinsi/D.I.

b. Kepala Kantor Wilayah/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Daerah propinsi/DI sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam wilayah yang bersangkutan.

c. Kepala Kantor/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Daerah Kabupaten/Kota untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi primer dan koperasi sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Semua penandatanganan pengesahan akta koperasi ditingkat manapun harus dilakukan dengan bertindak untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi dan UKM.⁴⁹ Pengesahan akta diberikan

dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan dan akta pendirian koperasi akan diumumkan dalam Berita Negara. Apabila permintaan pengesahan ditolak, maka para pendiri koperasi dapat mengajukan permintaan ulang dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan dan keputusannya akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah permintaan ulang.

Apabila suatu koperasi sudah merupakan suatu badan hukum, maka koperasi tersebut berpredikat sebagai subjek hukum, yang dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi yang dapat pula dituntut atau dikenai sanksi dan hukuman. Sehingga, bagi para orang-perorangan atau badan hukum lainnya yang akan membuat hubungan hukum dengan koperasi, menjadi jelas untuk mendudukan posisinya atau kepentingannya dalam berhubungan dengan koperasi tersebut.⁵⁰

⁴⁹ Hasil wawancara dengan M Salman Selaku Pegawai Dinas Koperasi Kabupaten Brebes.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kartono ,S.H. Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Tegal.

Koperasi sebagai badan hukum pasti memiliki hubungan hukum dengan dengan subjek hukum lainnya, seperti pengurus, anggota maupun pihak ketiga di luar koperasi. Pendirian koperasi

merupakan aspek hukum pertama yang terjadi dalam ranah hukum koperasi. Di dalam prakteknya, sebuah akta pendirian koperasi harus disepakati bersama oleh minimal 20 (dua puluh) orang pendiri.

Melalui pengesahan terhadap akta pendirian koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi, maka koperasi tersebut telah resmi memperoleh status badan hukum. Apabila di kemudian hari ternyata koperasi tersebut melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajiban untuk membayar hutang kepada pihak ketiga, maka dengan status badan hukum, dapat diketahui siapa yang akan bertanggung jawab secara hukum terhadap wanprestasi tersebut.⁵¹

Apabila wanprestasi tersebut kemudian dapat dibuktikan itu disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dari manager, maka managerlah yang dapat dituntut oleh pihak ketiga. Namun apabila wanprestasi bukan disebabkan kesalahan teknis dari manajemen melainkan karena situasi yang tidak dapat diatasi secara

⁵¹ Hasil wawancara dengan Kartono ,S.H. Selaku Kepala Seksi Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Tegal. managerial di luar kemampuan manager, maka pertanggungjawaban untuk mengatasi wanprestasi tersebut berada pada badan usaha koperasi.

Dari gambaran tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa status badan hukum mempunyai arti yang sangat penting bagi koperasi, yaitu terdapatnya pemisahan terhadap status harta kekayaan yang menjadi milik koperasi dengan harta kekayaan pribadi milik para anggota koperasi. Apabila dikemudian hari ternyata koperasi tersebut mengalami kebangkrutan, maka pihak ketiga tidak dapat menuntut para pendiri koperasi atau anggota koperasi secara pribadi untuk menuntut bertanggungjawab melunasi semua utang-utang atau kewajiban-kewajiban. Apabila ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa para anggota yang menjadi penyebab dari terjadinya kebangkrutan tersebut, maka anggota koperasi hanya dapat dituntut untuk bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita koperasi hanya sebesar jumlah simpanan yang mereka setorkan saja. Badan hukum koperasi adalah merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri. Jadi apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban hukum, maka harta milik pribadi-pribadi para anggotanya tidak menjadi objek tuntutan untuk suatu tanggungjawab badan hukum, karena memang telah terjadi pemisahan yang tegas antara status badan hukum dan kekayaan pribadi dari para anggota dalam koperasi tersebut.⁵²

5. Peranan Notaris didalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi

Peranan notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu memberikan nasihat untuk perkembangan koperasi kedepannya. Notaris dapat membuat akta-akta koperasi secara utuh, sehingga para anggota koperasi merasa terarah dalam membangun koperasi tersebut. Oleh karena itu, akta koperasi yang dibuat oleh notaris dapat memberikan hal positif dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh, para notaris dapat memahami tentang sosok koperasi, sehingga pada saat berhubungan langsung dengan koperasi, Notaris dapat dengan benar-benar memberikan pelajaran yang positif bagi perkembangan koperasi yang bersangkutan.⁵³

⁵² Hasil wawancara dengan M Salman Selaku Pegawai Dinas Koperasi Kabupaten Brebes.

⁵³ Hasil wawancara dengan notaris Deviyanti Novita ,S.H. Dan notaris Yuni Andaryanti ,S.H.

Semenjak Keputusan Menteri Negara Koperasi Nomor 98 Tahun 2004 diterbitkan, maka masyarakat yang akan mendirikan koperasi akan selalu berhubungan terlebih dahulu dengan notaris.

Sehingga mau tidak mau para notaris diharapkan dapat menjadi pintu pertama dalam upaya menumbuhkan koperasi yang kuat, tangguh, dan mandiri.

Keterlibatan notaris tidak semata-mata hanya membantu proses pembuatan akta-akta koperasi saja, tetapi juga turut peduli terhadap prospek perkembangan koperasi yang menjadi kliennya dan bersedia memberikan bimbingan/nasihat dan konsultasi hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta koperasi. Tujuannya adalah agar kalangan koperasi dan kalangan masyarakat semakin memahami tentang koperasi. Notaris diharapkan juga tidak mengenakan biaya yang terlalu mahal atau biaya yang memberatkan bagi koperasi yang berkaitan dengan pemberian jasa. Hal ini bukan berarti memanjakan koperasi tetapi harus diingat bahwa masyarakat yang berminat untuk mendirikan koperasi umumnya adalah masyarakat tingkat menengah ke bawah. Umumnya mereka masih memandang bahwa berurusan dengan notaris adalah sesuatu yang mahal dan mewah.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan notaris Nur Halimah ,S.H., Hertanti Pindayani ,S.H. dan Deviyanti Rosita ,S.H.

Sampai dengan Mei Tahun 2010, jumlah koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM kabupaten Brebes berjumlah 324 koperasi, dan jumlah koperasi yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM kota Tegal berjumlah 188 koperasi.⁵⁵

Pengawasan terhadap Notaris Pembuat Akta Koperasi secara khusus dilakukan oleh Menteri dan Pejabat perkoperasian. Hal ini diatur didalam Pasal 13 Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang menyebutkan bahwa, Menteri dan pejabat berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris Pembuat Akta Koperasi. Notaris Pembuat Akta Koperasi wajib mengirimkan laporan Tahunan mengenai akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan kepada pejabat yang berwenang di wilayah kerjanya, paling lambat pada bulan Februari setelah berakhirnya tahun yang telah berjalan.

Didalam menjalankan jabatannya, seorang notaris dilarang untuk mengadakan promosi yang menyangkut jabatannya. Notaris juga dilarang membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah kerja Notaris Pembuat Akta Koperasi yang bersangkutan.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan M Salman Selaku Pegawai Dinas Koperasi Kabupaten Brebes.

Apabila notaris tersebut melanggar larangan tersebut, maka Menteri dapat melakukan tindakan dalam bentuk teguran, surat peringatan atau mencabut kewenangan notaris yang bersangkutan dalam membuat akta koperasi.

B. Fungsi Dari Akta Pendirian Koperasi Yang Dibuat Oleh Notaris

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dengan berlandaskan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut adanya alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Akta otentik sebagai alat bukti yang kuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam berbagai segi kehidupan masyarakat. Kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak, diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dan sekaligus menghindari terjadinya sengketa.

Peranan notaris didalam sebuah negara hukum adalah sebagai abdi hukum yang diberi kewenangan oleh negara. Akta otentik merupakan salah satu instrument penting yang terkait secara fungsional dengan proses peradilan. Notaris merupakan jabatan yang menjalankan profesinya dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik

dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dan selanjutnya notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, dan memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum adalah merupakan organ negara yang mendapat tugas dan kewajiban, serta wewenang dan tanggung jawab dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum dibidang keperdataan, khususnya didalam pembuatan akta dan peresmian akta.

Pembuatan akta otentik diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, sekaligus

⁵⁶ Hasil wawancara dengan notaris Deviyanti Rosita ,S.H. dan notaris Suprihatin ,S.H.
bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris.

Yang dimaksud dengan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan.⁵⁷

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi mengenai akta otentik, yaitu suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Notaris Pembuat Akta Koperasi memiliki tugas untuk membuat akta otentik sebagai bukti bahwa telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu didalam proses pendirian koperasi, perubahan Anggaran Dasar koperasi serta akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi untuk dimintakan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang. Dalam hal ini pejabat yang berwenang adalah Menteri Koperasi dan UKM. Minuta akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris selanjutnya disimpan di kantor notaris.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan notaris Deviyanti Rosita ,S.H.

Akta pendirian koperasi inilah yang menjadi dasar hukum dari sebuah perkumpulan koperasi dan bagi anggota-anggotanya berlaku sebagai undang-undang. Akta pendirian koperasi tersebut merupakan

Anggaran Dasar koperasi yang mengikat dan harus dipatuhi oleh semua anggota dan pengurus koperasi.

Dilihat dari fungsinya, maka akta berfungsi sebagai :

1. *Formalitatis causa* (fungsi formal), syarat untuk adanya sesuatu;
2. *Probationes causa* (satu-satunya alat bukti);
3. Alat bukti. Setidak-tidaknya suatu akta merupakan salah satu alat bukti.⁵⁸

Fungsi dari akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris adalah sebagai syarat untuk adanya sesuatu (*formlitatis causa*). Maksudnya adalah untuk lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formal untuk adanya sesuatu, dengan kata lain tanpa adanya akta tersebut maka tidak ada suatu keadaan hukum atau hubungan hukum. Disini akta notaris merupakan syarat untuk adanya koperasi. Jadi untuk koperasi tersebut bisa berbadan hukum, salah satu syaratnya adalah koperasi tersebut harus melampirkan akta pendirian koperasi yang

⁵⁸ Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), Hal. 154

dibuat oleh notaris. Apabila koperasi tersebut tidak mempunyai akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris, koperasi tersebut tidak bisa berbadan hukum.

Notaris didalam membuat suatu akta, harus memperhatikan ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan. Notaris mempunyai kewajiban membacakan isi akta yang dibuatnya tersebut dihadapan para pihak dan saksi-saksi, supaya apa yang termuat didalam akta tersebut diketahui, dan sesuai kehendak para pihak.⁵⁹

Apabila seseorang akan mendirikan koperasi, namun membuat sendiri pengesahan akta pendiriannya tanpa melalui seorang notaris, maka akta tersebut dapat diragukan keabsahannya oleh pihak lain yang akan menjalin kerjasama dengan koperasi tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris sebagai dokumen resmi yang bersifat otentik memerlukan perlindungan terhadap isi dari akta tersebut dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, notaris harus membuat akta pendirian koperasi sesuai bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan undang-undang. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, bahwa bentuk dan sifat akta setiap akta notaris terdiri dari :

1. Awal akta atau kepala akta, memuat :

- a. Judul akta,
- b. Nomor akta,

⁵⁹ Hasil wawancara dengan notaris Deviyanti Rosita ,S.H. dan notaris Nurhalimah ,S.H.

c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun,

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

2. Badan akta, memuat :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili,
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap,
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan, dan
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.
3. Akhir atau penutup akta, memuat :
- a. Uraian tentang pembacaan akta,
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada,
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Menurut Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Bertitik tolak dari pasal tersebut, maka kekuatan pembuktian dari akta notaris adalah terletak dalam minuta aktanya.

Akta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang sesuatu peristiwa hukum dan ditanda tangani oleh yang berkepentingan dan notaris, hal ini bermaksud bahwa akta itu dibuat sebagai tanda bukti yang berfungsi untuk memastikan suatu peristiwa hukum dengan tujuan untuk menghindari terjadinya sengketa, maka pembuatan akta harus dibuat sedemikian rupa sehingga apa yang diinginkan dapat diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat notaris tersebut.

Akta dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Yaitu :

a. Akta Otentik

Akta otentik adalah suatu tulisan yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuat itu, menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak daripadanya, tentang segala hal yang disebut dalam akta dan juga yang ada didalam akta sebagai pemberitahuan, hal terakhir ini hanya jika hal yang diberitahukan itu berhubungan langsung dengan perihal yang disebut dalam akta itu. Akta yang dibuat maksudnya adalah pegawai yang bersangkutan membuat akta itu, jenisnya bisa berupa *ambtelijke akte*. Sedangkan dihadapan maksudnya adalah yang membuat isi akta adalah pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan pegawai umum (notaris,) hanya menyaksikan, menuliskan dalam bentuk akta dan kemudian membacakan isi akta kepada para pihak. Akta pendirian koperasi termasuk didalam *ambtelijke akte*.

Didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Dari pengertian tersebut, dapat atau dihadapan pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang. Akta otentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1) *Ambtelijke akte* atau *relaas akte* atau *Procesverbaal akte*

Adalah akta yang memuat keterangan resmi dari pejabat yang berwenang. Jadi akta ini hanya memuat keterangan dari satu pihak saja, yakni pihak pejabat yang membuatnya. Akta ini dianggap mempunyai kekuatan pembuktian terhadap semua orang. Contohnya adalah akta kelahiran, akta nikah.

2) *Partij akte* (akta pihak)

Adalah akta yang memuat keterangan apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. *Partij akte* ini mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi pihak-pihak yang bersangkutan.⁶⁰

⁶⁰ Mochammad Dja'is dan RMJ Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), Hal. 154

Adalah suatu akta yang dibuat oleh para pihak tanpa bantuan pejabat umum, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Akta dibawah tangan berisi pernyataan maksud dari para pihak guna mewujudkan suatu perbuatan hukum yang oleh mereka ditulis dengan tulisan sendiri. Hal ini berarti para pihak mengakui atau tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta resmi, akan tetapi jika tandatangan itu disangkal, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian itu diwajibkan untuk membuktikan kebenaran tentang penandatanganan atau isi akta tersebut.

Pertimbangan perlunya dituangkan didalam bentuk akta otentik adalah untuk menjamin kepastian hukum guna melindungi pihak-pihak. Suatu akta yang memiliki karakter otentik, maka akta itu akan mempunyai daya bukti, sehingga hal ini merupakan jaminan bagi para pihak bahwa perbuatan atau keterangan-keterangan yang dikemukakan memberikan suatu bukti yang nyata.

C. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Dan Cara Mengatasi Hambatan Tersebut

1. Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi

Dari penelitian di lapangan yang saya lakukan, diperoleh beberapa permasalahan dalam pembuatan akta koperasi yang dilakukan oleh notaris, yaitu antara lain :

- a. Pembekalan tentang perkoperasian bagi notaris calon Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dirasakan belum memadai. Karena Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah pejabat pertama yang akan berhubungan langsung dengan para pendiri koperasi dalam rangka pembuatan akta koperasi. Untuk itu bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi diperlukan ilmu pengetahuan yang cukup besar tentang perkoperasian.
- b. Banyak para pendiri koperasi yang datang kepada notaris mereka tidak memahami apa itu koperasi, sehingga notaris tidak dengan gampang bisa membuat akta pendirian koperasi.
- c. Banyak para pendiri koperasi yang takut untuk datang kepada notaris, karena banyak dari para pendiri koperasi yang beranggapan bahwa berurusan dengan notaris membutuhkan dana yang mahal.⁶¹

2. Cara Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi

- a. Bagi notaris calon Notaris Pembuat Akta Koperasi sebaiknya diberikan pembekalan yang cukup besar tentang ilmu perkoperasian dan diberikan bekal pengalaman-pengalaman dari para petugas yang sebelum adanya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dalam menangani pembuatan akta pendirian koperasi.
- b. Banyak para pendiri koperasi yang tidak memahami tentang koperasi, sehingga dalam hal ini notaris juga harus memberikan penjelasan tentang koperasi kepada para pendiri. Setelah para pendiri koperasi memahami tentang perkoperasian, maka Notaris Pembuat Akta Koperasi membuat akta pendirian koperasi yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga harus membantu perkembangan koperasi tersebut ke depannya, supaya koperasi tersebut dapat berjalan lebih maju.

⁶¹ Hasil wawancara dengan notaris Deviyanti Rosita ,S.H., notaris Nur Halimah ,S.H., dan notaris Suprihatin ,S.H.

- c. Banyak para pendiri koperasi yang takut untuk datang kepada notaris, karena mereka menganggap bahwa berhubungan dengan notaris memerlukan dana yang mahal. Untuk itu, notaris juga harus memberikan penjelasan kepada para pendiri, bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor

98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang menyebutkan tentang Notaris adalah Pembuat Akta Koperasi, sehingga apabila para pendiri koperasi ingin membuat akta pendirian terhadap koperasi tersebut, maka para pendiri harus membuatnya di notaris, karena notarislah yang berwenang untuk membuat akta pendirian koperasi.⁶²

⁶² Hasil wawancara dengan notaris Deviyanti Rosita ,S.H., notaris Nur Halimah ,S.H., dan notaris Suprihatin ,S.H.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang

lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu memberikan nasihat atau penjelasan kepada pendiri koperasi untuk perkembangan koperasi kedepannya. Notaris dapat membuat akta-akta koperasi secara utuh, sehingga para anggota koperasi merasa terarah dalam membangun koperasi tersebut. Oleh karena itu, akta koperasi yang dibuat oleh notaris dapat memberikan hal positif dalam pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan secara sungguh-sungguh, para notaris dapat memahami tentang sosok koperasi, sehingga pada saat berhubungan langsung dengan koperasi, notaris dapat dengan benar-benar memberikan pelajaran yang positif bagi perkembangan koperasi yang bersangkutan.

Semenjak Keputusan Menteri Negara Koperasi Nomor 98 Tahun 2004 diterbitkan, maka masyarakat yang akan mendirikan koperasi akan selalu berhubungan terlebih dahulu dengan notaris. Sehingga mau tidak mau para notaris diharapkan dapat menjadi pintu pertama dalam upaya menumbuhkan koperasi yang kuat, tangguh, dan mandiri. Keterlibatan notaris tidak semata-mata hanya membantu proses pembuatan akta-akta koperasi saja, tetapi juga turut peduli terhadap prospek perkembangan koperasi yang menjadi kliennya dan bersedia memberikan bimbingan dan konsultasi hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta koperasi. Tujuannya adalah agar kalangan koperasi dan kalangan

masyarakat semakin memahami tentang koperasi. Notaris diharapkan juga tidak mengenakan biaya yang terlalu mahal atau biaya yang memberatkan bagi koperasi yang berkaitan dengan pemberian jasa. Hal ini bukan berarti memanjakan koperasi tetapi harus diingat bahwa masyarakat yang berminat untuk mendirikan koperasi umumnya adalah masyarakat tingkat menengah ke bawah. Umumnya mereka masih memandang bahwa berurusan dengan notaris adalah sesuatu yang mahal dan mewah.

2. Fungsi dari akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris adalah sebagai syarat untuk adanya sesuatu (*formlitis causa*). Maksudnya adalah untuk lengkap atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuat suatu akta. Disini akta merupakan syarat formal untuk adanya sesuatu, dengan kata lain tanpa adanya akta tersebut maka tidak ada suatu keadaan hukum atau hubungan hukum. Disini akta notaris merupakan syarat untuk adanya koperasi. Jadi untuk koperasi tersebut bisa berbadan hukum, salah satu syaratnya adalah koperasi tersebut harus melampirkan akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris. Jadi kalau koperasi tersebut tidak mempunyai akta pendirian koperasi yang dibuat oleh notaris, maka koperasi tersebut tidak bisa berbadan hukum. Akta pendirian koperasi merupakan *ambtelijk akte*.

Akta otentik pada hakikatnya memuat sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris mempunyai

kewajiban untuk membacakan isi dari akta yang dibuatnya tersebut dihadapan para pihak dan saksi-saksi, dengan maksud supaya apa-apa yang termuat didalam akta tersebut benar-benar diketahui, dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak.

Apabila seseorang akan mendirikan koperasi, namun membuat sendiri pengesahan Anggaran Dasarnya tanpa melalui seorang notaris, maka akta tersebut dapat diragukan keabsahannya oleh pihak lain yang akan menjalin kerjasama dengan koperasi tersebut.

Akta yang dibuat oleh notaris sebagai dokumen resmi yang bersifat otentik memerlukan perlindungan baik terhadap akta itu sendiri, maupun terhadap isi dari akta tersebut dari penyalahgunaan pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, maka notaris harus membuat akta pendirian koperasi sesuai dengan bentuk dan tata cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

3. Dari penelitian di lapangan yang penulis lakukan, diperoleh beberapa permasalahan dalam pembuatan akta koperasi yang dilakukan oleh notaris, yaitu antara lain :

a. Pembekalan tentang perkoperasian bagi notaris calon Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) dirasakan belum memadai. Karena Notaris Pembuat Akta Koperasi adalah pejabat pertama yang akan berhubungan langsung dengan para pendiri koperasi

dalam rangka pembuatan akta koperasi. Untuk itu bagi Notaris Pembuat Akta Koperasi diperlukan ilmu pengetahuan yang cukup besar tentang perkoperasian.

- b. Banyak para pendiri koperasi yang datang kepada notaris mereka tidak memahami apa itu koperasi, sehingga notaris tidak dengan gampang bisa membuat akta pendirian koperasi.
- c. Banyak para pendiri koperasi yang takut untuk datang kepada notaris, karena banyak dari para pendiri koperasi yang beranggapan bahwa berurusan dengan notaris membutuhkan dana yang mahal.

Cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah :

- a. Bagi notaris calon Notaris Pembuat Akta Koperasi sebaiknya diberikan pembekalan yang cukup besar tentang ilmu perkoperasian dan diberikan bekal pengalaman-pengalaman dari para petugas yang sebelum adanya Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dalam menangani pembuatan akta pendirian koperasi.
- b. Banyak para pendiri koperasi yang tidak memahami tentang koperasi, sehingga dalam hal ini notaris juga harus memberikan penjelasan tentang koperasi kepada para pendiri. Setelah para pendiri koperasi memahami tentang perkoperasian, maka Notaris Pembuat Akta Koperasi membuatkan akta pendirian

koperasi yang bersangkutan. Selain itu Notaris juga harus membantu perkembangan koperasi tersebut ke depannya, supaya koperasi tersebut dapat berjalan lebih maju.

- c. Banyak para pendiri koperasi yang takut untuk datang kepada notaris, karena mereka menganggap bahwa berhubungan dengan notaris memerlukan dana yang mahal. Untuk itu, notaris juga harus memberikan penjelasan kepada para pendiri, bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 yang menyebutkan tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi, sehingga apabila para pendiri koperasi ingin membuat akta pendirian terhadap koperasi tersebut, maka para pendiri harus membuatnya di notaris, karena notarislah yang berwenang untuk membuat akta pendirian koperasi.

B. Saran

Sebaiknya Dinas Koperasi dan UKM melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pembuatan akta pendirian koperasi di hadapan notaris, karena akta-akta yang dibuat oleh notaris adalah akta-akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dibandingkan dengan akta yang dibuat dibawah tangan.

Sebaiknya notaris sebelum membuat akta pendirian koperasi harus terlebih dahulu dipastikan bahwa para pihak yang akan

membuat akta tersebut benar-benar telah memahami tentang perkoperasian. Kemudian setelah akta tersebut jadi, maka akta tersebut harus dibacakan di hadapan para pihak yang berkepentingan dan saksi-saksi dengan harapan supaya tidak terjadi penyalahgunaan akta di kemudian hari.

Sebaiknya pemerintah perlu membuat peraturan daerah di setiap kota dan kabupaten yang membahas mengenai kelangsungan hidup atau perkembangan koperasi tiap-tiap kota atau kabupaten dan juga perlu dibuat peraturan daerah yang membahas mengenai pengenaan biaya pembuatan akta pendirian koperasi dihadapan notaris.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983).
- Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995).
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1977).
- Andjar Pachta W, dan Myra Rosana Bachtiar, dan Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: BPFHUI, 2005).
- Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005).
- Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996).
- G. Kartasaputra, *Praktek Pengelolaan Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
- Ignatius Ridwan Widayadharma, *Hukum Profesi*, (Jakarta: CV. Ananta, 1994).
- Ima Suwandi, *Koperasi: Organisasi Ekonomi Yang Berwatak sosial*, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1985).
- J. Satria, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1993).
- Liliana Tedjosaputro, *Malpraktek Notaris dan Hukum Pidana*, (Semarang: CV. Agung, 1994).
- Muhammad Adam, *Asal-Usul dan Sejarah Akta Notarial*, (Bandung: CV. Sinar Baru, 1985).

- Mochammad Dja'is, dan RMJ Koosmargono, *Membaca Dan Mengerti HIR*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010).
- Pandji Anoraga, dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
- Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta: BPFE, 1997).
- R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia, cetakan II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).
- Sudarsono, dan Edilius, *Koperasi Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005).
- Sudarsono, dan Edilius, *Manajemen Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Tan Thong Kie, *Buku II Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang *Perkoperasian*.
- , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Jabatan Notaris.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 Tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahaan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 124/Kep/M.KUKM/X/2004 Tentang Penugasan

Pejabat Yang Berwenang Untuk Memberikan
Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran
Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor
98/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagai
Pembuat Akta Koperasi

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 1994 Tentang Persyaratan
dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan
Perubahan anggaran Dasar Koperasi.

